STRATEGI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT NELAYAN DAN PENGELOLAAN TEMPAT PELELANGAN IKAN
(Studi Kasus TPI Desa Muara Gading Mas, Lampung Timur)

(Skripsi)

Oleh

Khusnul Khotimah
NPM 1716021008

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2021

ABSTRAK

STRATEGI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT NELAYAN DAN PENGELOLAAN TEMPAT PELELANGAN IKAN
(Studi Desa Muara Gading Mas, Kabupaten Lampung Timur)

Oleh

Khusnul Khotimah

Desa Muara Gading Mas merupakan salah satu desa di Kecamatan Labuhan Maringgai Kabupaten Lampung Timur yang sebagian besar masyarakatnya berprofesi dan menggantungkan hidupnya sebagai nelayan. Sebagai salah satu wilayah yang mempunyai potensi perikanan cukup besar dan satu-satunya TPI di Kabupaten Lampung Timur yang termasuk dalam TPI Higenis meski dalam kegiatan dan aktivitas tidak lagi menggunkan sistem lelang murni TPI ini tetap beroperasional. Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui Strategi Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Lampung dalam memberdayakan dan mengelola TPI Higenis. Tipe penelitian yang digunakan adalah deskriptif dengan pendekatan kualitatif, dengan fokus penelitian Prinsip-prinsip Pemberdayaan yang dikemukankan oleh Maryani dan Nainggolan (2009:11) yaitu: (a) Prinsip Kesetaraan, (b) Prinsip Partisipasi, (c) Prinsip Kemandirian dan (d) Prinsip Berkelanjutan. Adapun hasil penelitiannya sebagai berikut: Pada prinsip kesetaraan strategi yang diterapkan adalah sosialisasi, kegiatan sosialisasi kapada masyarakat nelayan tentang aturan menjaga kebersihan lingkungan. Prinsip Partisipasi, pada tahap ini strategi yang dilakukan adalah dengan memberikan pembinaan sebagai bentuk pemberdayaan masyarakat tentang cara penanganan ikan yang benar. Prinsip Kemandirian, tahap ini strategi yang dilakukan agar membuat masyarakat lebih mandiri dengan memberikan pelatihan tentang cara penanganan rajungan di miniplant dan yang terakhir Prinsip Keberlanjutan adalah bentuk strategi yang dilakukan dalam mengelola TPI Higenis yaitu dengan pengadaan TPA dan Pengerukan kolam pelabuhan. Strategi yang dilakukan sudah berhasil namun belum optimal.

Kata Kunci: Strategi, Pemberdayaan dan Pengelolaan, Tempat Pelelangan Ikan.

ABSTRACT

FISHERMAN COMMUNITY EMPOWERMENT STRATEGY AND FISH AUCTION PLACE MANAGEMENT
(Study of Muara Gading Mas Village, East Lampung Regency)

By

Khusnul khotimah

Muara Gading Mas Village is one of the villages in Labuhan Maringgai District, East Lampung Regency, where most of the people work and depend their lives as fishermen. As one of the areas that has quite large fishery potential and the only TPI in East Lampung Regency which is included in the Hygenic TPI, even though in its activities and activities it no longer uses a pure auction system, this TPI is still operational. The purpose of this study is to determine the strategy of the Department of Maritime Affairs and Fisheries of Lampung Province in empowering and managing Hygenic TPI. The type of research used is descriptive with a qualitative approach, with a research focus on Empowerment Principles proposed by Maryani and Nainggolan (2009:11), namely: (a) Equality Principle, (b) Participation Principle, (c) Independence Principle and (d)) Sustainability Principles. The results of the research are as follows: On the principle of equality the strategy applied is socialization, outreach activities to fishing communities about the rules for maintaining environmental cleanliness. Principle of Participation, at this stage the strategy is to provide guidance as a form of community empowerment on how to handle fish correctly. The principle of independence, this stage is a strategy carried out to make the community more independent by providing training on how to handle small crabs in miniplants and the last one is the Sustainability Principle is a form of strategy carried out in managing hygienic TPI, namely by procuring TPA and dredging port ponds. The strategy has been successful but not optimal.

Keywords: Strategy, Empowerment and Management, Fish Auction Place.

STRATEGI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT NELAYAN DAN PENGELOLAAN TEMPAT PELELANGAN IKAN
(Studi Kasus TPI Desa Muara Gading Mas, Lampung Timur)

Oleh

Khusnul Khotimah

Skripsi

Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar
SARJANA ILMU PEMERINTAHAN

Pada

Jurusan Ilmu Pemerintahan
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2021

Judul Skripsi	: **STRATEGI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT NELAYAN DAN PENGELOLAAN TEMPAT PELELANGAN IKAN (Studi Kasus TPI Desa Muara Gading Mas, Lampung Timur)**
Nama Mahasiswa	: *Khusnul Khotimah*
Nomor Pokok Mahasiswa	: **1716021008**
Program Studi	: **Ilmu Pemerintahan**
Fakultas	: **Ilmu Sosial dan Ilmu Politik**

MENYETUJUI

1. Komisi Pembimbing

Drs. R. Sigit Krisbintoro, M.IP.	**Lilih Muflihah, M.IP.**
NIP. 19611218 198902 1 001	NIK. 231608 20509 201

2. Ketua Jurusan Ilmu Pemerintahan

Drs. R. Sigit Krisbintoro, M.IP.
NIP. 19611218 198902 1 001

MENGESAHKAN

1. Tim Penguji

Ketua : **Drs. R. Sigit Krisbintoro, M.IP.**

Sekretaris : **Lilih Muflihah, M.IP.**

Penguji : **Drs. Aman Toto Dwijono, M.H.**

2. Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Dra. Ida Nurhaida, M.Si.
NIP. 19610807 198703 2 001

Tanggal Lulus Ujian Skripsi : **04 Oktober 2021**

PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa :

1. Karya tulis saya, Skripsi ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik (Sarjana), baik di Universitas Lampung maupun diperguruan Tinggi lain.

2. Karya tulis ini murni gagasan, rumusan dan penelitian saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan Tim Pembimbing dan Penguji.

3. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.

4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah berlaku di Universitas Lampung.

Bandar Lampung, 04 Oktober 2021
Buat Pernyataan

Khusnul Khotimah
NPM. 1716021008

RIWAYAT HIDUP

Penulis bernama lengkap Khusnul Khotimah, dilahirkan di Maringgai,Kabupaten Lampung Timur pada tanggal 23 Januari 2000. Penulis merupakan anak kedua dari tiga bersaudara, putri dari pasangan Bapak Selamat Riyadi dan Ibu Senibah. Jenjang pendidikan penulis dimulai dari Taman Kanak yaitu TK Ibunda Pertiwi Labuhan Maringgai,Kabupaten Lampung Timur pada tahun 2004 dan melanjutkan sekolah dasar ke SDN 2 Labuhan Maringgai pada tahun 2005-2011. Selanjutnya penulis menempuh pendidikan Sekolah Menengah Pertama di SMP Islam Nurul Iman pada tahun 2011-2014. Penulis melanjutkan pendidikan Sekolah Menengah Atas di SMA Negeri 1 Bandar Sribhawono,Kabupaten Lampung Timur pada tahun 2014-2017. Selanjutnya Penulis melanjutkan pendidikan di Perguruan Tinggi Negeri Universitas Lampung melalui jalur SNMPTN. Penulis terdaftar sebagai mahasiswa jurusan Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik pada tahun 2017.

Selama menjadi mahasiswa, penulis tergabung dalam beberapa organisasi yang ada di kampus maupun di luar kampus. Seperti tergabung dalam Himpunan Mahasiswa (HMJ) Jurusan Ilmu Pemerintahan sebagai Assisten Sekretaris Umum (Assekum) pada tahun kepengurusan 2018-2019. Penulis juga tergabung dalam Koperasi Mahasiswa Universitas Lampung atau KOPMA UNILA sebagai wakil devisi PSDA pada tahun kepengurusan 2018-2019. Penulis juga tergabung dalam Paduan Mahasiswa Universitas Lampung atau PSM sebagai Anggota pada tahun 2019-2020. Selain organisasi di dalam kampus Penulis juga aktif mengikuti organisasi berbasis pendidikan yaitu Lampung Cerdas dan mempunyai jabatan sebagai wakil sekretaris pada tahun 2017-2020. Lalu pada bulan Januari 2020, Penulis telah

melaksanakan Kuliah Kerja Nyata (KKN) selama 40 hari sebagai bentuk pengabdian kepada masyarakat sekaligus kewajiban studi di Desa Gunung Terang, Kecamatan Air Hitam Kabupaten Lampung Barat. Serta telah melaksanakan Praktik Kerja Lapangan (PKL) di Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Bandar Lampung Selama 30 Hari dan kemudian pada Tahun 2021, Penulis bekerja di salah satu Perusahaan Media di Lampung yaitu Tribun Lampung dengan jabatan sebagai Account Executive Digital (AE Digital) di bagian devisi Bussines.

MOTTO

"Boleh jadi kamu membenci sesuatu padahal ia amat baik bagimu, dan boleh jadi pula kamu menyukai sesuatu padahal ia amat buruk bagimu, Allah mengetahui sedang kamu tidak mengetahui"

(QS. Al-Baqarah:216)

"Believe in something bigger than yourself and find your purpose in life"

(Justin Bieber)

"You'll find you become more confident when you stop trying to be someone else's, definition of beautiful and smart start being your own"

(Cenul)

PERSEMBAHAN

Alhamdulilahirobil'alamin telah Engkau Ridhoi Ya Allah segala langkah hambaMu, sehingga pada akhirnya skripsi ini dapat terselesaikan.

Sholawat teriring salam semoga selalu tercurahkan kepada nabi besar Muhammad SAW, semoga skripsi ini dapat memberikan ilmu yang bermanfaat.

Segala ketulusan hati, aku persembahkan karya sederhana ini kepada:

Kedua Orang Tua Tercinta
Selamat Riyadi dan Senibah, S.Pd.i

Sudaraku Tersayang
Yulia Safitri, S.Pd dan Ilham Firdaus

Terimakasih atas segala dukungan baik moril maupun materil, kasih sayang serta semangat dan segala doa untukku yang telah kalian berikan sehingga karya ini dapat aku persembahkan.

Almamater Tercinta Universitas Lampung

SANWACANA

Segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala atas nikmat dan karunia-Nya, sehingga Penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **"Strategi Pemberdayaan Masyarakat Nelayan dan Pengelolaan Tempat Pelelangan Ikan (Studi Kasus TPI Desa Muara Gading Mas, Kabupaten Lampung Timur)"** sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Ilmu Pemerintahan pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Lampung.

Penulis menyadari bahwa dalam menyusun dan menyelesaikan skripsi ini terdapat keterbatasan kemampuan dan pengetahuan yang dimiliki. Tanpa bantuan dari berbagai pihak, skripsi ini mustahil dapat terwujud dengan baik. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini Penulis menyampaikan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah banyak membantu dalam penyusunan skripsi ini antara lain, yaitu:

1. Allah SWT. Atas segala kebesaran, kuasa, pertolongan serta kesehatan dan petunjuk yang selalu Engkau berikan. Nabi Muhammad SAW. atas risalah dan cahaya kebenaran yang disampaikan kepada kami.
2. Bapak Prof. Dr. Karomani, M.Si, selaku Rektor Universitas Lampung.
3. Ibu Dra. Ida Nurhaida, M.Si selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung.
4. Bapak Drs. R Sigit Krisbintoro, M.IP selaku Ketua Jurusan Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung sekaligus Dosen Penguji. Terima kasih atas segala saran dan masukan serta ilmu yang Bapak berikan agar menghasilkan karya yang maksimal sehingga penulis mampu menyelesaikan penyusunan skripsi ini dengan sebaik-baiknya. Semoga segala kebaikan yang Bapak berikan bernilai pahala dari Allah SWT.
5. Bapak Drs. Aman Toto Dwijono, M.H selaku Dosen Penguji Penulis. Terimakasih atas segala bimbingan,arahan dan masukkan sehinggan skripsi ini

dapat terselesaikan dengan baik dan menjadi suatu karya tulis yang dapat menjadi referensi dan masukkan bagi pihak yang tertuju. Semoga segala kebaikan yang Bapak berikan bernilai pahala dari Allah SWT.

6. Bapak Drs. R. Sigit Krisbintoro, M.IP selaku Dosen Pembimbing Utama skripsi Penulis. Terima kasih atas segala bimbingan, ilmu, masukan, saran dan motivasi yang membangun demi terciptanya progres yang signifikan terhadap skripsi penulis sehingga penulis mampu menyelesaikan skripsi ini dan studi pada waktunya. Terima kasih juga atas kebaikan dan rasa pengertian yang tinggi terhadap penulis. Semoga segala kebaikan yang Bapak berikan bernilai pahala dari Allah SWT.
7. Ibu Lilih Muflihah, M.IP selaku Dosen Pembimbing Kedua skripsi. Terimakasih atas segala ilmu, masukan, saran dan koreksinya yang sangat detail selama proses bimbingan agar menghasilkan karya yang maksimal sehingga penulis mampu menyelesaikan skripsi ini sampai dengan tahap sebaik-baiknya. Semoga segala kebaikan yang ibu berikan bernilai pahala dari Allah SWT.
8. Seluruh Dosen dan Staf Jurusan Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung meski tak dapat disebutkan namanya satu persatu, tetapi tidak mengurangi rasa hormat Penulis kepada Bapak Ibu semua. Terima kasih atas segala ilmu yang sangat bermanfaat bagi penulis. Semoga segala kebaikan yang Bapak/Ibu berikan bernilai pahala dari Allah SWT.
9. Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Lampung, Kepala dan Staff UPTD PPP Labuhan Maringgai, Kasi Pelabuhan PPP Labuhan Maringgai, Manager TPI Higenis, dan Masyarakat Nelayan. Terima kasih telah memberikan izin, data dan informasi kepada Penulis dalam melaksanakan penelitian ini, sehingga Penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan baik.
10. Kedua orang tua tercinta, Selamat Riyadi dan Senibah, S.Pd.i yang tidak pernah putus mendoakan Penulis dalam segala kebaikan. Terima kasih atas semua kasih sayang, motivasi, semangat, kerja keras, dan didikan yang selama ini telah kalian berikan untuk Penulis. Semoga penulis dapat menjadi anak yang senantiasa membanggakan serta membahagiakan dan Semoga Allah SWT selalu memberikan perlindungan, kesehatan serta kasih sayang-Nya kepada Mama dan Ayah.

11. Kedua saudaraku, Atu Lia dan Adek Ilham. Terima kasih atas segala semangat, kasih sayang, canda tawa serta sedikit pengertiannya sebagai kakak dan adik yang telah diberikan kepada penulis selama ini. Semoga Allah SWT selalu memberikan perlindungan, kesehatan dan kemudahan dalam segala urusan kalian sehingga kita semua mampu menjadi anak yang membanggakan serta membahagiakan Mama dan Ayah.
12. Keluarga besar Raden Semarep dan Sulaiman Pendekar, paman, bibi dan sepupu-sepupuku tersayang, terima kasih atas segala doa dan semangat yang telah kalian berikan sehingga Penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
13. Sahabatku, Dwi Lista Septiyani, Maela Putri Handika, Hania Saputri, S,IP., Roida Alifah, Asy Syifa Elmania Mahdi, S.IP., Thassa Resty P A, dan Zakia Salsabila. Terima kasih selama ini selalu menjadi sahabat yang setia menemani dan membantu penulis semenjak semester awal, yang sudah menjadi teman pelepas penat selama masa perkuliahan. Semoga pertemanan kita selalu terjaga.
14. Sahabatku, Neneng Widyaningsih, Ira Andriyani, Ayu Sundari, Siti Masitoh, Rizky Maymun, Helidazia Al-Habsyie, Citra Medyantina, dan Melati Yolanda. Terima kasih telah menemani Penulis dari masa SMP sampai saat ini, Terimakasih telah menjadi tempat terbaik dalam berbagi suka maupun duka, senantiasa menguatkan dan menghibur Penulis dan tidak pernah meninggalkan Penulis. Semoga kita selalu menemukan kebahagiaan dimanapun dan kapanpun.
15. Sahabatku, Muhammad Rafly. Terima kasih telah memberikan waktunya serta membantu Penulis dalam mencari data-data untuk keperluan skripsi ini. Semoga selalu berhasil dan tetap menjadi sahabat Penulis dimanapun dan kapanpun.
16. Mba Fani Destia,S.IP., Tersayang yang telah dengan sabar mengajarkan Penulis dari awal menulis skripsi. Terimakasih banyak untuk motivasi, waktu yang diluangkan, dan ilmu yang diberikan, semoga kita selalu menjaga silaturahmi dengan baik dimanapun dan kapanpun.
17. Abang dan Mbaku tersayang di Komunitas Berbagi Nasi Lampung , Mba Fani, mba Winda, mba Meisya, mba Untsa, mba annisa, bang Yogi, bang Irfan, bang Agung dan bang Irfan. Terimakasih atas bimbingannya selama ini, tidak hanya

dari komunitas berbagi tetapi mba dan abang mengajarkan dan memberikan arahan kepada Penulis tentang perskripsian sehingga penulis menjadi lebih paham dan bisa menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Semoga silaturahmi kita selalu terjaga di manapun kita berada.

18. Abang, Mba, dan Teman-teman Presidium HMJ Ilmu Pemerintahan 2018-2019. Terimakasih atas pengalaman dan Ilmu yang telah diberikan dalam Kepengurusan HMJ Ilmu Pemerintahan yang sangat berkesan, banyak sekali pengalaman dan ilmu yang di dapat oleh Penulis seperti menyelenggarakan kegiatan LKTI, LKMMTJ dan kegiatan lainnya yang bisa membuat Penulis mempunyai pengalaman di bidang kepemimpinan. Semoga silaturahmi kita selalu terjaga dimanapun dan kapanpun kita berada.
19. Abang, mba dan teman teman di Lampung Cerdas. Bang Ipul, bang Yopi, bang Pascal, mba Ade, dan mba Resty. Terimakasih Karena telah memberikan pengalaman dan ilmu kepada Penulis serta motivasi dalam menyelesaikan skripsi ini, Semoga silaturahmi kita selalu terjaga dimanapun dan kapanpun kita berada.
20. Teman-teman Angkatan 2017 Jurusan Ilmu Pemerintahan, terkhusus kelas Reguler B yang tidak dapat Penulis sebutkan namanya satu-persatu. Terima kasih sudah mengisi hari-hari Penulis di kampus. Semoga kita dapat dipertemukan dilain kesempatan dan sukses untuk kita semua.
21. Keluarga KKN Gunung Terang, Gita, Bintang, Anggi, Ima, David, Irfan, Bang Nova, Bang Agung dan Keluarga Bapak Sukarjo. Terima kasih atas kebaikan, suka duka, canda tawa, keseruan berkeliling wisata yang ada di Lampung Barat, serta lagu-lagunya yang telah kita lewati bersama dan tidak akan pernah penulis lupakan. Terimakasih juga atas doa dan dukungan yang kalian berikan selama proses penyusunan skripsi ini.
22. Seluruh pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu, yang telah membantu Penulis sehingga skripsi ini dapat terselesaikan
23. *Last but not least*, Cenul. *I wanna thank me,I wanna thank me for believing in me, I wanna thank me for doing all this hard work, I wanna thank me for having no days off , I wanna thank me for never quitting, I wanna thank me for always being a giver and tryna give more than receive and I wanna thank me for tryna*

do more right than wrong, I wanna thank me for just being me at all times, thank you for surviving this far, me and myself.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, sehingga besar harapan Penulis semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak yang membutuhkan. Akhir kata Penulis ucapkan terima kasih, semoga amal baik yang telah diberikan kepada Penulis mendapat balasan dari Allah SWT.

Bandar Lampung, 10 Oktober 2021

Khusnul Khotimah

DAFTAR ISI

Halaman

DAFTAR ISI ..... **i**

DAFTAR TABEL ..... **iv**

DAFTAR GAMBAR ..... **v**

DAFTAR SINGKATAN ..... **vi**

I. PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang 1
1.2 Rumusan Masalah 13
1.3 Tujuan Penelitian 13
1.4 Manfaat Penelitian 14

II. TINJAUAN PUSTAKA
2.1 Konsep Strategi 15
2.2.1 Model Strategi 17
2.2 Konsep Pemberdayaan 19
2.2.1 Prinsip-prinsip Pemberdayaan 21
2.2.2 Tahap-tahap Pemberdayaan 22
2.2.3 Pemberdayaan Masyarakat Nelayan 23
2.3 Strategi Pemberdayaan 25
2.4 Indikator Keberdayaan 26
2.5 Fungsi Pemerintah dalam Pemberdayaan 27
2.6 Definisi Pengelolaan 29
2.7 Konsep Manajemen Pemberdayaan 30
2.8 Kerangka Pikir 32

III. METODE PENELITIAN
3.1 Tipe Penelitian 35
3.2 Fokus Penelitian 36
3.3 Informan Penelitian 38
3.4 Jenis Data 39
3.4.1 Data Primer 39
3.4.2 Data Sekunder 40
3.5 Teknik Pengumpulan Data 41

3.5.1 Wawancara 41
3.5.2 Dokumentasi.....42
3.5.3 Observasi 43
3.6 Teknik Pengolahan Data 43
3.6.1 Editing 43
3.6.2 Interpretasi. 44
3.7 Teknik Analisis Data.....44
3.7.1 Reduksi Data 45
3.7.2 Penyajian Data.....45
3.7.3 Penarikan Kesimpulan.....46
3.8 Teknik Keabsahan Data 46
3.8.1 Trigulasi Data 46

IV. GAMBARAN UMUM
4.1 Gambaran umum Desa Muara Gading Mas (MGM), Kecamatan Labuhan Maringgai, Kabupaten Lampung Timur 48
4.1.1 Sejarah terbentuknya Desa Muara Gading Mas 48
4.1.2 Kondisi Geografis dan Demografis 49
4.1.3 Keadaan Sosial Ekonomi Desa Muara Gading Mas.....50
4.1.4 Visi dan Misi Desa Muara Gading Mas 51
4.1.5 Struktur Organisasi Desa Muara Gading Mas.....52
4.2 Sejarah berdirinya TPI Desa Muara Gading Mas 54
4.2.1 Sejarah Berdirinya TPI Higenis.....54
4.2.2 Tujuan dan Fungsi Pendirian TPI Muara Gading Mas.....55
4.2.3 Visi dan Misi TPI Muara Gading Mas 56
4.2.4 Struktur Organisasi TPI Muara Gading Mas.....57
4.3 Gambaran umum Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Lampung 59
4.3.1 Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Lampung 59
4.3.2 Strategi Dinas Perikanan Provinsi Lampung.....60
4.3.3 Visi dan Misi Dinas Perikanan Provinsi Lampung 61
4.3.4 Struktur Organisasi Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Lampung.....62

V. HASIL DAN PEMBAHASAN
5.1 Hasil Penelitian 66
5.1.1 Strategi Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Lampung dalampengelolaan TPI Desa Muara Gading Mas. 66
5.1.2 Strategi Internal dalam Pemberdayaan dan Pengelolaan TPI Higenis desa Muara Gading Mas 82
5.1.3 Strategi Eksternal dalam Pemberdayaan dan Pengelolaan TPI Higenis desa Muara Gading Mas 91
5.1.4 Pemberdayaan dan Pengelolaan TPI Higenis dalam Prinsip Kesetaraan 94
5.1.5 Pemberdayaan dan Pengelolaan TPI Higenis dalam Prinsip Partisipasi 102
5.1.6 Pemberdayaan dan Pengelolaan TPI Higenis dalam Prinsip Kemandirian 110

5.1.7 Pemberdayaan dan Pengelolaan TPI Higenis dalam Prinsip Berkelanjutan.....115
5.2 Pembahasan.....124
5.2.1 Program Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Lampung.....125
5.2.2 Kerja sama Dinas Kelautan dan Perikanan dengan KUD Bina Mina.....125
5.2.3 Strategi Dinas Kelautan dan Perikanan dalam Prinsip Pemberdayaan.....127

VI. SIMPULAN DAN SARAN
6.1 Simpulan.....137
6.2 Saran.....139

DAFTAR PUSTAKA.....141

LAMPIRAN.....145

DAFTAR TABEL

Halaman

Tabel 1. Jumlah Nelayan di Indonesia Tahun 2020 1

Tabel 2. Laju pertumbuhan PDB Tahun 2020..... 2

Tabel 3. Tempat Pelelangan ikan di Kabupaten Lampung Timur..... 5

Tabel 4. Jumlah dan produksi harga dari kapal 5

Tabel 5. Penarikan retribusi kepada Nelayan 7

Tabel 6. Penelitian Terdahulu..... 11

Tabel 7. Data Informan..... 38

Tabel 8. Keterangan Pengambilan Data Primer Penelitian 39

Tabel 9. Keterangan Pengambilan Data Sekunder Penelitian 40

Tabel 10. Kegiatan Wawancara..... 42

Tabel 11. Kondisi mata pencaharian masyarakat Desa Muara Gading Mas 51

Tabel 12. Program Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Lampung Tahun 2020..... 83

Tabel 13. Rencana Program Pengelolaan Tempat Pelelangan Ikan di Desa Muara Gading Mas Tahun 2021..... 89

Tabel 14. Kegiatan atau Program Pembinaan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Lampung tahun 2020..... 103

Tabel 15. Triangulasi Data Penelitian 119

DAFTAR GAMBAR

Halaman

Gambar 1. Kerangka Pikir..... 34

Gambar 2. Struktur Organisasi Desa Muara Gading Mas..... 53

Gambar 3. Struktur Organisasi Tempat Pelelangan Ikan Higenis Desa Muara Gading Mas 59

Gambar 4. Struktur Organisasi Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Lampung..... 64

DAFTAR SINGKATAN

ADHK : Atas Dasar Harga Konstan

CPIB : Cara Penanganan Ikan yang Baik

KBBI : Kamus Besar Bahasa Indonesia

KPLI : Kekurangan pembayaran lelang ikan

KPPRB : Komite Pengolahan Perikanan Rajungan Berkelanjutan

KUBE : Kelompok Usaha Bersama

KUD : Koperasi Unit Desa.

MGM : Muara Gading Mas

OPD : Organisasi Perangkat Daerah.

PAD : Pendapatan Asli Daerah.

PDB : Produk Domestik Bruto

PKP : Pengerukkan Kolam Pelabuhan.

POAC : *Planning, Organizing, Actuating, Controling*

PPP : Pelabuhan Perikanan Pantai.

SDA : Sumber Daya Alam

SDM : Sumber Daya Manusia

SOP : Standar Operasional Prosedur

TPA : Tempat Pembuangan Akhir.

TPI : Tempat Pelelangan Ikan

UPIB : Unit Pengolahan Ikan Besar.

UPTD : Unit Pengawasan Teknis Daerah.

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia merupakan negara yang sangat kaya akan tangkapan hasil lautnya, menyimpan potensi sumberdaya hayati dan non hayati yang melimpah. Ini menyebabkan sebagian besar masyarakat tinggal dan menempati daerah sekitar wilayah pesisir dan menggantungkan hidupnya sebagai nelayan, tidak heran jika industri perikanan menjadi lapangan pekerjaan untuk para masyarakat yang tinggal di wilayah pesisir. Berdasarkan kondisi dan keadaan sumberdaya lautnya yang melimpah, maka dari itu Indonesia disebut juga sebagai negara maritim. Jumlah nelayan perikanan laut di Indonesia menurut kategori nelayan maka status nelayan penuh merupakan jumlah terbesar dari jumlah nelayan sambilan utama maupun sambilan tambahan dan jumlah ini setiap tahunnya menunjukkan peningkatan (Aji dkk, 2016:3)

Berikut ini adalah jumlah nelayan di Indonesia dari tahun 2017-2020 yang menunjukkan adanya peningkatan jumlah nelayan di setiap tahun.

Tabel 1. Jumlah Nelayan di Indonesia Tahun 2020

Jumlah Nelayan di Indonesia yang terdata pada Kementrian dan Kelautan Perikanan (KKP) dari tahun 2017-2020				
Tahun	2017	2018	2019	2020
Jumlah	500.000	138.679	150.000	1.459.874

(Sumber: *Pusat Pelatihan dan Penyuluhan Kelautan dan Perikanan 2020*)

Data di atas menunjukkan bahwa adanya indikasi jumlah nelayan yang besar merupakan suatu potensi yang besar dalam pembangunan perikanan. Keberadaan nelayan selama ini selalu dihadapkan dengan sejumlah

permasalahan yang terus datang, seperti lemahnya manajemen pengelolaan, rendahnya kesadaran masyarakat akan teknologi, kesulitan dalam modal usaha, dan pembangunan infrastruktur. Dilihat Secara potensial industri perikanan di Indonesia memberikan hal positif yaitu memberikan manfaat bagi kehidupan ekonomi, sosial dan kebudayaan. Namun, di sisi lain memberikan hal negatif jika tidak dikelola dengan baik tanpa perencanaan yang matang. Untuk menunjang dan mendukung hal tersebut perlu adanya pembangunan sarana dan prasarana. Prasarana tersebut adalah berupa pelabuhan perikanan yang berfungsi sebagai penunjang peningkatan produksi dan sumber ekonomi bagi masyarakat di wilayah pesisir. Pelabuhan dan pengembangan akan mendukung dan merealisasikan konsep wawasan nusantara ditinjau dari aspek pembangunan perikanan nasional dalam memanfaatkan potensi sumber daya ikan di wilayah perairan Indonesia.

Selain jumlah nelayan yang terus bertambah setiap tahunnya, dan memberikan dampak positif dan negatif bagi pembangunan perikanan di Indonesia, berikut adalah tabel yang menunjukkan laju pertumbuhan ekonomi di Indonesia.

Tabel 2. Laju pertumbuhan PDB Tahun 2020

PDB Perikanan ADHK			**Laju pertumbuhan PDB Perikanan**	
Tahun	2019	2020	2019	2020
Jumlah	Rp.452,06 Triliun	Rp.452,39 Trilliun	Kelompok perikanan (5,07%)	PDB Nasonal (2,97%)

(Sumber: *Pusat Data Statistika dan Informasi Kementerian Kelautan dan Perikanan 2020*)

Data Pertumbuhan ekonomi Indonesia pada tahun 2020 di atas menunjukkan bahwa laju pertumbuhan ekonomi mengalami penurunan kontraksi dibandingkan kurtal IV tahun 2019. Meskipun mengalami penurunan namun aktivitas ini menunjukkan adanya peningkatan pada daya beli (*purchasing power*) dari para pelaku sektor kelautan dan perikanan dibandingkan sektor lain pada kelompok pertanian dan kehutanan. Pertumbuhan sektor perikanan tahun

2020 menunjukkan bahwa sektor perikanan baik perikanan tangkap maupun perikanan budidaya menunjukkan potensi besar dalam pembangunan ekonomi Indonesia.

Provinsi Lampung adalah Provinsi terujung yang ada di Pulau Sumatera, lebih tepatnya dibagian ujung selatan. Provinsi Lampung memiliki 15 kabupaten dan kota, untuk sumberdaya perikanan laut Lampung memiliki beberapa wilayah pantai timur dan pantai barat. Provinsi Lampung juga merupakan salah satu Provinsi dengan penghasil perikanan yang cukup menyokong dalam sektor kelautan dan perikanan. Salah satu tempat nelayan dalam memasarkan dan mengembangkan usahanya adalah Tempat Pelelangan Ikan. Tempat Pelelangana Ikan atau TPI adalah tempat untuk nelayan memasarkan hasil tangkapannya yang berupa hasil tangkapan dari laut yaitu ikan, udang, kepiting, dsb.

Tempat Pelelangan Ikan mempunyai tujuan utama yaitu untuk menarik sejumlah konsumen sehingga nelayan dapat menjual hasil tangkapannya dengan mudah dan mendapatkan harga yang baik serta dapat menciptakan prasarana yang sehat melalui lelang murni di lingkungan TPI. Selain itu, TPI memiliki fungsi pokok sebagai prasarana pendukung aktivitas nelayan dalam melakukan kegiatan penangkapan ikan di laut, penanganan dan pengolahan hasil ikan tangkapan dan pemasaran yang dilakukan secara lelang serta sebagai tempat untuk melakukan pengawasan kapal ikan. TPI biasanya teletak didalam pelabuhan atau pangkalan pendaratan ikan, dan di tempat ini terjadi transaksi jual beli hasil tangkapan laut baik secara lelang maupun tidak termasuk dalam TPI yang menjual/melelang ikan darat. Biasanya, TPI dikoordinasikan oleh Dinas Perikanan, Koperasi, atau Pemerintah Daerah. Menurut Aji dan Junaidi (2016:5) TPI yang dibangun harus sesuai dengan kriteria sebagai berikut :

a. Tempat tetap (tidak berpindah- pindah);
b. Mempunyai bangunan tempat transaksi penjualan ikan;
c. Ada yang mengkoordinasi prosedur lelang/penjualan dan;
d. Mendapat izin dari instansi yang berwenang.

Kabupaten Lampung Timur memiliki dua Tempat Pelelangan Ikan (TPI) yang digunakan masyarakat setempat untuk menjalankan roda perekonomian, dan sebagaian besar pekerjaan masyarakat setempat berprofesi sebagai nelayan. Di Lampung Timur mempunyai sedikitnya dua TPI yang terletak di Desa Margasari Kecamatan Labuhan Maringgai dan di Desa Muara Gading Mas. Desa Muara Gading Mas atau kerap disingkat dengan nama MGM memiliki enam desa dengan tipologi pesisir yaitu desa yang berbatasan langsung dengan laut. Empat desa di Kabupaten Lampung Timur mendapatkan program Sekaya Maritim pada tahun 2015, yakni Desa Sri Minosari, Karang Anyar, Sukorahayu dan Desa Margasari. Mayoritas penduduk kedua desa tersebut bermata pencaharian sebagai nelayan (66,12%) untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari karena profesi nelayan adalah sebuah profesi yang memiliki ketergantungan pada ekosistem. Desa Muara Gading Mas yang merupakan desa terdekat dengan pantai dan laut menjadikan mayoritas pekerjaan masyarakat setempat berprofesi sebagai nelayan dan menggantungkan hidupnya dari hasil tangkapan laut (Rostiyati, 2018:191).

Dilihat dari aspek ekonomi, dengan adanya proses pelelangan ikan maka nelayan dapat diuntungkan karena memperoleh harga dengan harga jual ikan yang standar. TPI merupakan bagian dari pembangunan perikanan yang diharapkan mampu membantu perekonomian dan meningkatkan produktifitas dari kegiatan nelayan baik dalam hal pendaratan, pengelolaan, pelelangan maupun proses pemasaran yang dijarakan secara baik. Dalam aspek masyarakat atau sosial diharapkan mampu memasarkan dan menjaga hasil tangkapannya.Kabupaten Lampung Timur mempunyai dua TPI yang berada di Desa Margasari dan Desa Muara Gading Mas Kecamatan Labuhan Maringgai, terlihat pada Tabel 3. dibawah.

Tabel 3. Tempat Pelelangan ikan di Kabupaten Lampung Timur

No.	Nama Tempat Pelelangan Ikan	Desa/Kecamatan
1.	TPI Kuala Muara Gading Mas	Desa Muara Gading Mas, Kec. Labuhan Maringgai, Kab. Lampung Timur
2.	TPI Kuala Penet	Desa Margasari, Kec. Labuhan Maringgai, Kab. Lampung Timur.

(Sumber: *Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Lampung Tahun 2020*)

Kendati mempunyai dua TPI, namun hanya TPI di Desa Muara Gading Mas yang sampai saat ini masih berjalan dan beroperasi. Nelayan memperoleh nafkah dari hasil tangkapan yang dijual secara lelang di TPI, tetapi TPI di desa Kuala Muara Gading Mas sudah sejak 10 tahun terakhir tidak lagi menggunakan sistem lelang murni, para nelayan lebih memilih menjual hasil tangkapannya dengan mandiri. Meski sudah tidak lagi menggunakan sistem lelang, aktivitas di TPI Desa Muara Gading Mas ini tetap berjalan di bandingkan dengan TPI Desa Kuala Penet yang sejak 8 tahun terkahir sudah tidak beroperasi lagi. Sedangkan, untuk hasil tangkapan ikan laut oleh nelayan di Desa Muara Gading Mas banyak jenisnya dan bermacam-macam terlihat pada tabel dibawah:

Tabel 4. Jumlah dan produksi harga dari kapal

No.	Jenis Ikan	Volume	Harga
1.	Hiu Teriti	3,800,00 Kg	Rp. 40.000
2.	Kurisi	386,00 Kg	Rp. 30.000
3.	Layur	186,00 Kg	Rp. 25.000

(Sumber: *Pusat Informasi Pelabuhan Perikanan Labuhan Maringgai 2020*)

Tempat Pelelangan Ikan dengan sistem lelang murni yang sudah lama mati ini diperkuat dengan hasil wawancara Peneliti dengan Bapak Ibnu Burmi selaku Manager TPI Labuhan Maringgai:

> "Memang benar bahwa di TPI Kuala ini sudah sejak 10 tahun terakhir tidak lagi menggunakan sistem lelang, karena para bakul nelayan lebih memilih menjual hasil tangkapannya dan membongkar hasil tangkapannya di tempat masing-masing. KUD Bina Jaya yang

> mengelola TPI juga tidak berjalan jadi nelayan makin bingung dengan persoalan kekurangan dana. Walaupun begitu masih TPI tetap berfungsi dan beroperasional, masih ada transaksi jual dan beli tetapi sudah tidak lagi menggunakan sistem lelang murni. Untuk penarikan retribusi masih tetap berjalan namun, mereka membayar dengan seiklasnya, terkadang juga masih banyak nelayan yang tidak membayar retribusi" (Hasil wawancara pada 25 Maret 2021).

Umumnya sistem dari TPI adalah suatu pasar dengan sistem perantara melalui penawaran umum. Tujuan pendirian TPI adalah untuk kepentingan nelayan dan koperasi perikanan dengan tujuan untuk melepaskan kemiskinan hal ini semakin berkembang untuk sarana pemungutan retribusi oleh Pemerintah Daerah melalui tingkat I, tingkat II, dan sebagainya. Pada dasarnya TPI adalah sebagai salah satu unit kegiatan ekonomi yang potensial dalam menunjang PAD melalui sumbangan retribusinya, adapun besaran nilai retribusi TPI di atur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 04 tahun 2002 Tentang Retribusi Tempat pelelangan ikan sebesar 5%.

Sedangkan berdasarkan wawacara Peneliti dengan Bapak Sukarsono, S.Pi selaku Ketua UPTD PPP Labuhan Maringgai sebagai berikut:

> "Untuk penarikan retribusi di TPI sesuai dengan kesepakatan dan SOP serta Peraturan daerah yang berlaku. Jumlah retribusi yang di tarik adalah sebesar 5% lalu, 2% nya akan disetorkan ke kas daerah kabupaten" (Hasil Wawancara 05 April 2021).

Berikut ini adalah tabel yang berisi aktivitas penarikan retribusi bulan November dari Juru Tulis TPI Muara Gading Mas kepada nelayan yang ditarik secara ikhlas dan seadanya karena sistem penjualan lelang yang sudah mati dikarenakan kurangnya pengetahuan masyarakat nelayan tentang sistem lelang stabilisasi harga dan belum adanya peraturan yang secara teknis mengelola TPI yang sesuai serta terjadinya pendangkalan pada kolam pelabuhan yang membuat masyarakat nelayan sulit berlabuh dan bersandar dan membongkar hasil tangkapannya di TPI.

Tabel 5. Penarikan retribusi kepada Nelayan

November 2020				
Tgl	Hari	Piket	Raman kotor	Bersih
1	Minggu	Zul	100.00	75.000
2	Senin	Jamal	85.000	65.000
3	Selasa	Zul	35.000	25.000
4	Rabu	Jamal	95.000	70.000
5	Kamis	Zul	50.000	40.000
6	Jumat	Jamal	110.000	80.000
7	Sabtu	Zul	145.000	110.000
8	Minggu	Jamal	170.000	125.000
9	Senin	Zul	195.000	145.000
10	Selasa	Jamal	170.000	125.000
11	Rabu	Zul	90.000	70.000
12	Kamis	Jamal	130.000	100.000
13	Jumat	Zul	90.000	70.000
14	Sabtu	Jamal	140.000	105.000
15	Minggu	Zul	Kosong	Kosong
16	Senin	Jamal	35.000	25.000
17	Selasa	Zul	30.000	20.000
18	Rabu	Jamal	65.000	50.000
19	Kamis	Zul	35.000	25.000
Jumlah				1,325.000

*(*Sumber*: Diolah oleh Penulis, 2020)*

Berdasarkan data di atas mulai terlihat jelas permasalahan yang ada di TPI desa Muara Gading Mas yaitu, sistem lelang di Tempat Pelelangan Ikan yang sudah mati sejak lama karena secara teknis perencanaan belum adanya Standar Operasional Prosedur (SOP) yang secara spesifik mengatur teknis dalam pengelolaan TPI, sistem lelang yang tidak lagi berlaku dan mati ini membuat penarikan retribusi dalam pelaksanaanya tidak sesuai dengan peraturan daerah yang telah ada. Dalam Peraturan Daerah penarikan retribusi kepada setiap bakul atau nelayan yang menjual hasil tangkapannya adalah 2% namun pelaksanaaya berbeda justru seikhlasnya. Belum lagi KUD Bina Mina, koperasi yang seharusnya menaungi para nelayan dan berguna memberikan pinjaman modal bagi nelayan yang kurang modal justru mati dan tidak berjalan, masalah inilah yang membuat perlu untuk diteliti agar dapat melihat strategi apa saja yang dilakukan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi

Lampung dalam memberdayakan dan mengelola TPI Higenis yang terletak di Desa Muara Gading Mas.

Berikut hasil wawancara Peneliti dengan Bapak Arif Buston selaku ketua nelayan di TPI desa Muara Gading Mas terkait alasan nelayan tidak menggunakan sistem lelang murni dan KUD yang mati:

> "Alasan masyarakat nelayan yang lain sudah jarang berlayar ke laut lagi adalah karena permasalahan modal berlayar. Modal berlayar yang besar ditambah lagi dengan KUD Bina Mina yang mati membuat masyarakat nelayan bingung mencari pinjaman modal, yaa ujung-ujungnya pinjam ke bos bakul yang kadang pembayaranya menggunakan hasil tangkapan laut. Jadi hasil yang untuk dijual lagi sedikit, lebih ke rugi dan bukan untung. Hal ini juga yang menjadi salah satu penyebab sistem lelang murni di TPI Muara Gading Mas mati" (Hasil wawancara pada tanggal 25 Maret 2021)

Koperasi Unit Desa atau KUD adalah suatu koperasi serba usaha yang beranggotakan masyarakat desa dan berlokasi di daerah pedesaan. Pembentukan koperasi ini didasari dari beberapa koperasi pertanian kecil dan banyak jumlahnya dipedesaan. Adapun fungsi dari diberdirikannya KUD di suatu pedesaan adalah membantu meringankan perkonomian masyarakat yang masih lemah melalui pemberikan kredit kepada anggotanya. Di desa Muara Gading Mas mempunyai sebuah KUD yaitu KUD Bina Mina, KUD yang seharusnya menjadi sarana pelarian bagi masyarakat yang kekurangan modal berlayar justru berlih fungsi dan mati. Hal ini yang menyebabkan masyarakat di sekitar TPI Muara Gading Mas memutuskan untuk tidak berlayar karena tidak memiliki cukup modal dan memilih meminjam modal kepada Pembina yang akan dibayar dengan hasil tangkapan, selain itu pengetahuan atau pemahaman masyarakat tentang sistem pelelangan masih kurang dan ditambah dengan faktor teknis yaitu terjadinya pendangkalan terhadap kolam pelabuhan yang membuat kapal-kapal sulit untuk bersandar dan membongkar hasil tangkapannya di TPI Higenis. Sejak sepuluh tahun belakangan jual beli hasil tangkapan laut tidak lagi menggunakan sistem lelang, di karenakan kurang tegasnya peraturan, pengelolaan dan pemberdayaan dari Dinas Kelautan dan Perikanan dan Provinsi Lampung, sehingga menyebabkan banyaknya

kekurangan pembayaran lelang ikan atau KPLI oleh bakul bakul lelang dan mereka lebih memilih membongkar hasil tangkapan di lapak pembina masing-masing dan bukan di pelelangan sehingga hal ini bisa menyebabkan menurunnya PAD karena retribusi yang ditarik tidak sesuai dengan peraturan yang ada. Selain itu, kebersihan di TPI Muara Gading Mas yang menjadi pusat perhatian dari masyarakat yang datang karena masih belum bisa dikatakan bersih. Umumnya, Tempat Pelelangan Ikan yang bersih mempunyai tempat pembuangan sampah dan selokan yang dibersihkan agar tidak menimbulkan bau yang tidak sedap. Namun di TPI Muara Gading Mas masih banyak sampah dan comberan yang menggenang hal ini mengganggu pemandangan baik masyarakat maupun pendatang ditambah lagi dengan sulitnya mendapatkan air bersih di daerah sekitar Tempat Pelelangan Ikan menjadikan masalah ini harus segera ditangani dengan memberikan beberapa strategi yang dapat mengatasi permasalahan tersebut.

Pemerintah diharapkan dapat ikut serta bertanggung jawab dalam hal yang akan memberdayakan nelayan kecil dan membudidayakan ikan serta pengembangan SDM yang dengan adanya pembangunan berupa pelabuhan perikanan, juga Tempat Pelelangan Ikan (TPI) sebagai tempat pemasaran ikan yang dihasilkan dari upaya pengkapan akan membuat nilai jual yang diperoleh nelayan dan konsumen akhir akan jauh berbeda. Dengan begitu, siklus harga dan jual beli ikan dapat merata dan membawa stabilitas tidak hanya kepada pemilik ikan atau penjual melainkan juga pembeli.

Pengelolaan fasilitas yang tidak baik dapat mengakibatkan ketidakefektifan proses pengoptimalisasian pada hasil potensi laut, sehingga hal ini dapat menyebabkan kurang terserapnya semua hasil potensi kelautan yang dimiliki di wilayah tersebut dan hal ini sangat merugikan kerugian yang besar bagi pihak pengelola maupun bagi daerah tersebut. Pengelolaan yang dirasa masih belum optimal ini menyebabkan perlunya peningkatan strategi dalam memberdayakan dan pengelolaan dari TPI di Desa Muara Gading Mas. Masalah-masalah yang ada diatas dapat mempengaruhi aktivitas di ruang

ekonomi di kawasan TPI Muara Gading Mas. Pengaruh ini dapat berupa penurunan aktivitas dan peningkatan aktivitas maka dari itu pengelolaan yang baik dan peningkatan pada strategi pemberdayaan sangat diperlukan dalam masalah penanganan di TPI ini, pada hakikatnya TPI merupakan prasarana dalam meningkatkan sektor ekonomi perikanan hasil kelautan dan menampung aktivitas masyarakat yang berusaha di bidang perikanan meliputi usaha produksi, pemasaran, pengolahan dan SDM dalam pemberdayaan pengelolaan TPI di Desa Muara Gading Mas.

Pasal 2 Undang- undang Nomor 31 Tahun 2004 menyatakan bahwa Pengelolaan Perikanan dilakukan berdasarkan beberapa asas yaitu; asas manfaat, keadilan, kemitraan, pemerataan, keterbukaan, keterpaduan, efisiensi dan kelestarian berkelanjutan. Sementara itu, dalam pasal 2 Undang-undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, dinyatakan bahwa pengelolaan perikanan dilakukan berdasarkan asas: (a) manfaat; (b) keadilan; (c) kebersamaan; (d) kemitraan; (e) kemandirian; (f) pemerataan; (g) keterpaduan; (h) keterbukaan; (i) kelestarian; dan (k) pembangunan berkelanjutan (ayat 2). Pengelolaan perikanan harus di dasarkan pada asas-asas di atas, dengan adanya manajemen pengelolaan yang baik menjadi sangat penting untuk diimplementasikan. Hal ini di perlukan karena manajemen pengelolaan yang baik diperlukan untuk terus meningkatkan hasil, sehingga potensi yang dimiliki laut dapat terkelola dengan baik dan bermanfaat untuk segala hal.

Pelelangan ikan tidak hanya berfungsi sebagai tempat transaksi jual dan beli hasil tangkapan laut, tetapi berfungsi sebagai sarana satu kesatuan dari wilayah perairan, darat, dan sarana-sarana yang termasuk dalam basis penangkapan, baik yang bersifat alamiah ataupun yang bersifat buatan.TPI mengukir sejarah dengan kegiatan yang khas di dalamnya yaitu transaksi jual beli antara nelayan dan konsumen. TPI mempunyai fungsi dan tujuan yaitu mendorong mekanisme yang adil dengan menentukan batas atas dan batas bawah dari harga ikan yang dijual. Hal ini bertujuan meningkatkan ekonomi dan kesejahteraan nelayan serta masyarakat sekitar. Tujuan dan sasaran yang

hendak dicapai oleh Tempat Pelelangan Ikan di Desa Muara Gading Mas ini adalah pelayanan dan pemberdayaan pengelolaan TPI yang dapat dikelola dengan baik berdasarkan peraturan daerah Kabupaten Lampung Timur No. 04 tahun 2002 tentang Retribusi Tempat Pelelangan Ikan di Kabupaten Lampung Timur. Namun, praktek yang terjadi di lapangan tidak selalu sesuai dengan regulasi dan hakikat dari TPI, banyak TPI yang pada akhirnya mati dan tidak berfungsi karena kurangnya pengelolaan dan pemberdayaan yang baik dari masyarakat maupun lembaga.

Peneliti menemukan beberapa penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian ini, berikut adalah beberapa penelitian terdahulu:

Tabel 6. Penelitian Terdahulu

No.	Nama Peneliti	Tahun	Jenis	Judul
1.	Sulastri Wijaya	2015	Skripsi	Strategi Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Logending Kabupaten Kebumen untuk Meningkatkan Kesejahteraan Nelayan dalam Perspektif Ekonomi Islam.
2.	Faisal Bayu Aji Fifiana Wisnaeni Ratna Harwati	2016	Jurnal	Fungsi dan Penglolaan Tempat Pelelangan Ikan di Kab. Pati berdasarkan Peraturan Daerah No. 19 tahun 2009 tentang Pengelolaan Tempat Pelelangan Ikan.
3.	Irfiana Fitri Madani Arif Mahdiana Teuku Junaidi	2018	Jurnal	Analisis Kelembagaan dan Pengelolaan Tempat Pelelangan Ikan (TPI) untuk Peningkatan Kesejahteraan Nelayan di wilayah TPI Tegalsari, Kota Tegal Jawa Tengah.
4.	Nusaiba Zahratul Firdaus	2020	Skripsi	Pemberdayaan Masyarakat Pesisir melalui Program Kelompok Usaha Bersama (KUBE) Gumah (studi kasus Kelurahan Panggung Kec. Tegal Timur kota Tegal)

*(*Sumber*: Diolah oleh Peneliti, 2020)*

Skripsi oleh Sulastri Wijaya (2015) dengan judul Strategi Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Logending Kabupaten Kebumen untuk Meningkatkan Kesejahteraan Nelayan dalam Perspektif Ekonomi Islam, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Strategi apa yang digunakan TPI Logending dalam meningkatkan Kesejahteraan nelayan yang diukur dengan kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman.

Jurnal oleh Faisal Bayu Aji, Fifiana Wisnaeni, dan Ratna Harwati (2016) dengan judul Fungsi dan Penglolaan Tempat Pelelangan Ikan di Kabupaten Pati berdasarkan Peraturan Daerah No. 19 tahun 2009 tentang Pengelolaan Tempat Pelelangan Ikan menjelaskan Peraturan Perundangan pernah diterapkan dan diganti, yang berakibat pada perubahan pengelolaan dan fungsi Tempat Pelelangan Ikan (TPI). Jurnal ini diteliti karena mengalami perubahan pada fungsi TPI dan terdapat permasalahan serta pelanggaran yang muncul di seputar pelaksanaan fungsi-fungsi di Tempat Pelelangan Ikan di Kabupaten Pati. Adapun salah satu bentuk pelanggaran yang terdapat pada TPI di Kabupaten Pati adalah tidak melakukan admnistrasi bakul sebelum lelang dimulai.

Jurnal Irfiana Fitri Madani, Arif Mahdianadan Teuku Junaidi (2018) dengan judul Analisis Kelembagaan dan Pengelolaan Tempat Pelelangan Ikan (TPI) untuk peningkatan kesejahteraan nelayan di wilayah TPI Tegalsari, kota Tegal Jawa Tengah. Dalam jurnal ini menjelaskan dan membahas dengan tujuan untuk mengetahui sistem kelembagaan Tempat Pelelangan Ikan (TPI) dan Strategi Pengelolaan Tempat Pelelangan Ikan berdasarkan fungsi kelembagaannya. Jurnal ini membahas fungsi kelembagaan menjadi fokus utama dalam pembahasan. Sedangkan penelitian yang akan peneliti lakukan lebih fokus menjelaskan Strategi Pemberdayaan apa yang digunakan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Lampung dalam pengelolaan Tempat Pelelangan Ikan di Desa Muara Gading Mas.

Penelitian terakhir dilakukan oleh Nusaiba Zahratul Firdaus (2020) dengan judul skripsi Pemberdayaan Masyarakat Pesisir melalui Program Kelompok Usaha Bersama (KUBE) Gumah (studi kasus Kelurahan Panggung Kec. Tegal

Timur kota Tegal) dalampenelitian ini berfokus kepada pemberdayaan masyarakat pesisir di Kelurahan Panggung, pemberdayaan yang ditujukan untuk masyarakat yang tinggal di wilayah pesisir. Dimana proses pemberdayaan disesuaikan dengan potensi dan keterampilan yang dimiliki oleh masyarakat pesisir melalui program KUBE.

Penelitian ini membahas mengenai Strategi Pemberdayaan dari Dinas Perikanan terhadap Pengelolaan Tempat Pelelangan Ikan di Kabupaten Lampung Timur. Penelitian terdahulu yang menjadi referensi peneliti dalam menulis penelitian ini berbeda baik secara fokus penelitian, tempat, konsep maupun teori yang digunakan dalam penelitian ini. Dalam penelitian ini akan berfokus kepada Strategi pemberdayaan dari Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Lampung dalam Pengelolaan TPI di desa Muara Gading Mas. Berdasarkan latar belakang di atas disertai referensi penelitian terdahulu dan sumber informasi lain oleh karena itu penulis tertarik ingin melakukan penelitian dengan judul "Strategi Pemberdayaan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Lampung dalam Pengelolaan Tempat Pelelangan Ikan Tahun 2020 (studi TPI Desa Muara Gading Mas, Kabupaten Lampung Timur)."

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka rumusan masalah dari penelitian ini adalah "Bagaimana dan apa saja Strategi Pemberdayaan Dinas Kelautan dan Perikanan Provnsi Lampung dalam Pengelolaan Tempat Pelelangan Ikan di Desa Muara Gading Mas, Kabupaten Lampung Timur tahun 2020?"

1.3 Tujuan Penelitian

Untuk mengetahui Strategi Pemberdayaan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Lampung yang digunakan dalam Pengelolaan Tempat pelelangan Ikan di Desa Muara Gading Mas, Kabupaten Lampung Timur.

1.4 Manfaat Penelitian

1. Secara Teoritis

   Penelitian ini bermanfaat sebagai tambahan pengetahuan Akademis dan wawasan yang di harapkan dapat membantu mengembangkan ilmu baik secara konsep maupun teori yang berkaitan dengan Strategi Pemberdayaan dan Pengelolaan dalam Mengelola Tempat Pelelangan Ikan di Desa Muara Gading Mas, Kabupaten Lampung Timur.

2. Secara Praktis

   Penelitian ini bermanfaat sebagai bahan masukan atau rekomendasi bagi Pemerintah atau Dinas Kelautan dan Perikanan Perikanan Provinsi Lampung sebagai pengelola Tempat Pelelangan Ikan dalam mengelola TPI menggunakan Strategi Pemberdayaan dan Pengelolaan yang relevan berdasarkan kebutuhan dan permasalahan di TPI tersebut.

II. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Konsep Strategi

Kata Strategi berasal dari bahasa Yunani yaitu *Strategia*, yang berarti kata bentukan dari dua kata *Stratus* yang mempunyai arti Militer dan *Ag*yang artinya memimpin. Pada asal mula awaknya terbentuk kata strategi ini digunakan dalam bidang Militer yang mempunyai arti ataudiartikan sebagai kemampuan dalam memimpin pasukan untuk memenangkan perang. Namun, seiring dengan perkembangan waktu dan zaman istilah strategi juga digunakan dan dibawa dalam dunia bisnis sebagai pedoman dalam mengalokasikan sumberdaya yang terbatas dan usaha suatu organisasi didalamnya. Menurut Rangkuti (2006:2) ”Suatu perusahaan dapat mengembangkan strategi didalamnya untuk mengatasi ancaman, ancaman yang dimaksud bisa berasal dari eksternal maupun internal”. Dengan menggunakan strategi hal ini bisa mengatasi ancaman eksternal dan merebut peluang yang ada. Strategi merupakan alat untuk mencapai tujuan, dalam perkembangannya konsep mengenai strategi terus berkembang. Konsep strategi menurut beberapa ahli adalah sebagai berikut:

1. *Learned, Christensen, Andrews,* dan *Guth*, mengemukakan strategi merupakan alat untuk menciptakan keunggulan bersaing. Dengan demikian salah satu fokus dari strategi adalah memutuskan apakah bisnis tersebut harus ada atau tidak ada.
2. *Argyris, Minzberg, Steiner,* dan *miner,* mengemukakan startegi adalah respon secara terus-menerus maupun adaptif terhadap peluang dan ancaman eksternal serta kekuatan dan kelemahan internal yang dapat mempengaruhi suatu kelompok atau organisasi.

3. *Chandler,* mengemukakan strategi merupakan alat untuk mencapai tujuan perusahaan dalam kaitannya dengan tujuan jangka panjang, program tidak lanjut, serta prioritas alokasi sumberdaya.
4. *Porter,* mengemukakan strategi adalah alat yang baik dan sangat penting di gunakan untuk bersaing agar mencapai keunggulan masing-masing.

Menurut Chandler (dalam Rangkuti, 2006:3) mengatakan bahwa "Strategi adalah rencana dasar dari yang luas dari tindakan suatu organisasi untuk mencapai suatu tujuan. Strategi merupakan alat untuk mencapai tujuan dari perusahaan atau tujuan kaitannya dengan tujuan jangka panjang, program tindak lanjut serta prioritas alokasi sumber daya." Definisi strategi pertama yang dikemukakan oleh Chandler ini menyebutkan bahwa strategi merupakan tujuan jangka panjang dari suatau badan atau perusahaan serta pendayagunaan dan alokasi semua sumber daya yang penting untuk mencapai tujuan yang diinginkan.

Dalam konsep strategi yang dijelaskan oleh para ahli di atas, tak hanya mencakup masalah dan persoalan seputar dunia bisnis atau perusahaan semata. Namun konsep strategi memiliki artian dan cakupan yang luas, strategi dapat digunakan dimana saja tergantung penempatan dan dan dalam kondisi seperti apa. Dalam mengelola suatu badan seperti Tempat Pelelangan Ikan juga memerlukan strategi dalam pengelolaannya agar dapat berjalan dengan optimal. Pemahaman yang baik mengenai konsep strategi dan konsep-konsep lain yang berkaitan sangat menentukan suksesnya strategi yang disusun,konsep-konsep tersebut adalah:

1. *Competitive Advantage,* ini adalah suatu kegiatan atau agenda yang di buat oleh suatu perusahaan atau badan dengan tujuan membuat lebih unggul dari pada pesaingnya. Hal ini juga dapat dikaitkan dengan Strategi Pemberdayaan dalam Pengelolaan Tempat Pelelangan Ikan (TPI) di Desa Muara Gading Mas. Keunggulan dalam bersaing dalam pemberdayaan SDM menjadi salah satu contoh yang dapat menjadi peluang besar serta menjadi strategi pengelolaan yang dapat di terapkan di tempat pelelangan ikan. Bersaing dalam artian semangat dalam

memberdayakan SDM yang ada sehingga TPI dapat optimal dalam pengelolaanya.

2. *Distinctive Competence*, adalah tindakan yang dilakukan oleh suatu perusahaan atau badan agar dapat melakukan kegiatan yang lebih baik dari pesaingnya. Strategi ini dapat dipakai dalam pemberdayaan dalam pengelolaan Tempat Pelelangan Ikan (TPI) dengan tujuan memperbaiki sistem pengelolaan yang belum optimal. Dengan melakukan peningkatan mutu dan mencari sumber masalah yang ada serta melakukan perbaikan dengan begitu strategi pemberdayaan dalam pengelolaan Tempat Pelelangan Ikan dapat diterapkan dengan optimal.

Sejalan dengan konsep-konsep di atas tujuan dari seorang merencanakan strategi dalam perang adalah bisa mengontrol atas musuhnya. kontrol ini terjadi melalui suatu pola perang yang di manipulasi dengan cara agar titik berat perang tersebut bergerak ke arah yang menguntungkan si perencanaan strategi dan merugikan musuh (Rangkuti,2006:5). Dalam pengeloaan Tempat Pelelangan Ikan (TPI) juga memerlukan strategi dalam pemberdayaan TPI agar pengelolaannya dapat berjalan dengan baik dan maju. Strategi tak hanya dipakai dalam suatu perusahaan atau digunakan pasukan militer untuk mengalahkan musuhnya, dalam pengelolaan suatu tempat yang yang akan di buat menjadi maju atau meningkatkan kualitas perlu strategi yang tepat untuk dipakai agar dapat berjalan sesuai dengan yang diinginkan. Berbagai strategi muncul guna mengoptimalkan pengelolaan Tempat Pelelangan Ikan demi menciptakan strategi yang mampu membawa perubahan dan pengoptimalan.

2.2.1 Model Strategi

Strategi yang dimiliki oleh seseorang ataupun suatu organisasi tentu berbeda dalam setiap strategi dan situasi yang akan dihadapi. Pada umumnya Strategi diciptakan oleh suatu organisasi untuk mengalahkan strategi lawan, langkah yang perlu di perhatikan adalah kelemahan dari strategi lawan tersebut. Namun dalam pengelolaan Tempat Pelelangan Ikan juga membutuhkan strategi dalam pengelolaannya agar tetap dapat berjalan dengan optimal.

Menurut Schorder (dalam Sholiha, 2019:14) “Perencanan strategi merupakan analisa sistematis dan perumusan sasaran kedepan, respon-respon dari pilihan-pilihan, pemilihan optimal dan penetapan instruksi-instruksi untuk mengimplementasikannya secara rasional.” Namun ada pula strategi yang muncul seiring berjalannya waktu dan organisasi tersebut menggunakan strategi sesuai dengan kebutuhan.Adadua pandangan mengenai Strategi yaitu:

a. *Planning mode* (model perencanaan)

   Perencanaan dimaknai sebagai sebuah usaha penyusunan langkah untuk mencapai suatu tujuan. Sebelum melakukan hal seseorang yang sudah berfikir matang pasti mempunyai perencanaan yang matang pula. Menurut Alderc (dalam Sholiha,2019:16) ”Perencanaan mempunyai arti pemahaman sebagai suatu proses menentukan apa yang di inginkan, apa yang akan di capai di masa mendatang dan dalam perencanaan mempunyai tahapan-tahapan yang dibutuhkan untuk mencapainya.” Pandangan ini menjelaskan bahwa strategi sebagai suatu model perencanaan atau kumpulan pedoman eksplisit yang dikembangkan sebelumnya. Para manager atau pimpinan organisasi mengindentifikasi arah tujuan mereka, lalu dikembangkan rencana yang sudah di rencanakan dengan sistematis dan terstruktur untuk mencapai hal itu. Dalam hal ini terdapat kaitannya dengan strategi yang akan digunakan dalam pemberdayaan di dalam mengelola Tempat Pelelangan Ikan sehingga dapat berjalan sesuai fungsinya dengan optimal. Suatu strategi yang matang tentu membutuhkan perencanaan dalam pelaksanaannya dan model ini tentu sangat erat kaitanya dengan strategi yang akan di pakai dalam pengelolaan TPI di desa Muara Gading Mas.

b. *Evolutionary mode* (model evolusioner)

   Awal kata dari evolusioner atau akarnya berawal dari kata evolusi. Evolusi dimaknai sebagai perubahan yang bertahap. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) evolusi di artikan sebagai (pertumbuhan, perkembangan) secara bertahap atau perlahan-lahan (sedikit demi sedikit). Dan jika dikaitkan dengan konsep ini maka model evolusioner

dapat dimaknai bahwa dalam mencapai suatu tujuan memerlukan proses yang bertahap secara perlahan.

Berdasarkan pandangan ini strategi tidak selalu harus merupakan suatu rencana yang dipikirkan secara sistematis bahkan strategi berkembang dari waktu ke waktu sebagai pola dan keputusan yang bermakna. Model evolusioner menunjukkan bahwa dalam suatu strategi yang di buat dalam perencanaan yang matang akan tetap berjalan secara bertahap sebagai bentu dari pola keputusan yang bermakna dan dilaksanakan dalam membuat strategi yang dibutuhkan dalam pengelolaan TPI strategi yang dibuat dapat berjalan secara bertahap.

2.2 Konsep Pemberdayaan

Pemberdayaan merupakan sebagai upaya daripemenuhan kebutuhan yang di inginkan oleh individu, kelompok dan masyarakat luas agar mereka memiliki kemampuan melakukan suatu pilihan dan dapat mengontrol lingkungan dengan demikian keinginan-keinginanya dapat terpenuhi, termasuk aksebillitasnya terhadap sumberdaya yang terkait dengan pekerjaanya, aktivitas sosialnya dan aktivitas lainnya. Semejak tumbuhnya pengakuan bahwa manusia merupakan faktor yang sangat berperan dalam pembangunan maka dalam konteks pembangunan istilah pemberdayaan bukan merupakan hal baru tetapi sudah sering digunakan (Maryani & Nainggolan 2019: 1).

Pemberdayaan sebagai upaya untuk memberikan kesempatan dan kemampuan kepada kelompok masyarakat (miskin) untuk mampu dan berani bersuara *(voice)* atau menyuarakan pendapat, ide atau gagasannya, sesuai dengan konsep,metode,produk,tindakan,dll yang terbaik bagi pribadi, keluarga dan masyarakatnya (Maryani & Nainggolan 2019:2). Pemberdayaan mengandung arti perbaikan dari mutu hidup atau kesejahteraan setiap individu dan masyarakat baik antara lain dalam artian:

1. Perbaikan dalam ekonomi, terutama kecukupan dalam pangan
2. Perbaikan dalam kesejahteraan sosial (pendidikan dan kesejahteraan)
3. Kemerdekaan, bebas dari segala bentuk penindasan

4. Terjaminnya keamanan dan,
5. Terjaminnya hak asasi yang bebas dari rasa takut dan kekhawatiran.

Pemberdayaan lebih merajuk atau tertuju pada kemampuan orang, khususnya kelompok yang rentan dan lemah sehingga mereka memiliki kekuatan atau kemampuan (Wrihatnolo dan Dwidjowijoto 2007:12). Adapun ciri-ciri yang dikemukakan adalah sebagai berikut:

a. Berpartisipasi dalam proses pembangunan dan keputusan-keputusan yang mempengaruhi.
b. Memenuhi kebutuhan dasarnya sehingga mereka memiliki kebebasan *(freedom*), dalam artian bukan hanya bebas dalam mengemukakan pendapat tapi juga bebas dari kelaparan, kesakitan dan kebodohan.
c. Menjangkau sumber-sumber produktif yang memungkinkan mereka dapat meningkatkan pendapatannya dalam memperoleh barang-barang dan jasa-jasa yang mereka perlukan.

Pemberdayaan masyarakat merupakan sebuah konsep pembangunan ekonomi yang merangkum nilai-nilai sosial. Konsep ini menggambarkan paradigma baru dari pembangunan, yaitu *people centered,participatory, empowering and sustainable*. Konsep ini tidak hanya semata-mata memenuhi kebutuhan dasar (*basic needs*) dan mencegah proses kemiskinan lebih lanjut *(safety net*) dimana upaya yang di lakukan akan di arahkan langsung kepada akar persoalannya yaitu meningkatkan kemampuannya dengan megembangkan dan mendinamiskan potensinya, pendek kata memberdayakannya (Maryani & Nainggolan 2019:3).

Pemberdayaan masyarakat dikatakan suatu proses dari pembangunan yang membuat masyarakat berinisiatif untuk memulai proses kegiatan sosial dalam memperbaiki situasi dan kondisi diri sendiri. Pemberdayaan masyarakat bisa terjadi apabila masyarakat itu sendiri ikut dalam berpartisipasi, jadi pada intinya kata kunci dari pemberdayaan adalah meliputi: proses pembangunan, masyarakat berinisiatif memperbaiki situasi dan kondisi diri sendiri. Dengan kata lain keberhasilan dari program atau kegiatan pemberdayaan masyarakat

tidak hanya ditentukan oleh pihak yang melakukan pemberdayaan, tetapi juga aktifnya pihak yang di berdayakan untuk mengubah situasi dan kondisi menjadi lebih baik dari sebelumnya (Maryani & Nainggolan,2019:8).

Tujuan yang ingin dicapai dari pemberdayaan adalah membentuk individu dan masyarakat menjadi mandiri. Kemandirian tersebut meliputi kemandirian berfikir, bertindak dan mengendalikan apa yang mereka lakukan tersebut. Lebih lanjut perlu ditelusuri, apa yang sesungguhnya dimaknai sebagai suatu masyarakat yang mandiri. Kemandirian masyarakat adalah merupakan suatu kondisi yang di alami oleh masyarakat yang ditandai oleh kemampuan untuk memikirkan, memutuskan serta melakukan sesuatu yang dipandang demi mencapai, pemecahan masalah-masalah yang dihadapi dengan mempergunakan daya kemampuan yang terdiri atas kemampuan kognitif, konatif, psikomotorik, afektif, dengan pengerahan sumberdaya yang di miliki oleh lingkungan internal masyarakat tersebut (Maryani & Nainggolan 2019:9).

2.2.1 Prinsip-prinsip Pemberdayaan

Dalam rangka melaksanakan kegiatan pemberdayaan masyarakat, perlu di perhatikan prinsip-prinsip pemberdayaan masyarakat itu, menurut beberapa ahli terdapat Empat prinsip, yaitu: (a) Prinsip kesetaraan, (b) prinsip partisipasi, (c) prinsip ke swadayaan atau kemandirian, (d) prinsip berkelanjutan (Maryani & Nainggolan, 2019:11) :

a. *Prinsip Kesetaraan*

   Prinsip utama yang harus dipegang dalam proses pemberdayaan masyarakat ialah adanya kesetaraan atau kesejajaraan kedudukan antara masyarakat dan lembaga yang melakukan program-program pemberdayaan masyarakat,baik laki-laki maupun perempuan. Dinamika yang dibangun ialah hubungan kesetaraan dengan mengembangkan mekanisme dengan berbagai pengetahuan, pengalaman, serta keahlian satu sama lain.

b. *Prinsip partsipasi*

Program pemberdayaan yang dapat menstimulasi kemandirian masyarakat ialah program yang sifatnya partisipasif, direncanakan, dilaksanakan, diawasi dan dievaluasi oleh masyarakat itu sendiri. Untuk sampai pada tingkat tersebut perlu waktu dan proses pendampingan yang melibatkan pendampingan yang berkomitmen tinggi terhadap pemberdayaan masyarakat. Pada akhirnya masing-masing individu masyarakat tersebut mampu mandiri dalam memenuhi kebutuhan hidup dirinya dan keluarganya secara layak.

c. *Prinsip Keswadayaan atau kemandirian*

Prinsip keswadayaan ialah lebih menghargai dan lebih mengedepankan kemampuan masyarakat dari pada bantuan pihak lain. Konsep ini tidak memandang orang miskin sebagai objek yang tidak berkemampuan *"the have not*" melainkan sebagai subjek yang memiliki kemampuan sedikit "*the have little".*Dalam hal ini mereka memiliki kemampuan untuk menabung pengetahuan mendalam tentang kendala-kendala usahanya, mengetahui kondisi lingkungannya, memiliki tenaga kerja dan kemauan serta memiliki norma-norma bermasyarakat yang sudah lama di patuhi. Semua itu harus di gali dan di jadikan modal dasar bagi proses pemberdayaan.

d. *Prinsip berkelanjutan*

Program pemberdayaan perlu di rancang agar bisa berkelanjutan, sekalipun pada awalnya peran pendamping lebih dominan di banding dengan masyarakat itu sendiri. Secara perlahan dan pasti, peran pendamping akan makin berkurang, bahkan akhirnya akan di hapus karena masyarakat sudah mampu mengelola kegiatannya sendiri.

2.2.2 Tahap-tahap Pemberdayaan

Pemberdayaan tidak bersifat selamanya, melainkan sampai target masyarakat mampu untuk mandiri, dan kemudia di lepas untuk mandiri, meski dari jauh di jaga jarak agar tidak jatuh lagi. Dilihat dari pendapat tersebut berarti

pemberdayaan melalui suatu masa proses belajar, hingga mencapai status mandiri Soekanto (dalam Maryani & Nainggolan 2019:63). Pemberdayaan masyarakat memiliki tujuh tahapan atau langkah yang di lakukan, yaitu:

a. Tahap persiapan
b. Tahap pengkajian "*Assessment*"
c. Tahap perencanaan Alternatif program atau kegiatan
d. Tahap pemformalisasi Rencana aksi
e. Tahap "Implementasi" program atau kegiatan
f. Tahap evaluasi
g. Tahap terminasi

2.2.3 Pemberdayaan Masyarakat Nelayan

Masyarakat nelayan sebagai kelompok yang secara langsung memanfaatkan dan mengusahakan sumberdaya perikanan melalui kegiatan tangkap dan budidaya juga tidak terlepas dari masalah kemiskinan. Adanya undang-undang Nomor 7 tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, pembudidaya ikan, dan petambak garam sangat positif, di maksudkan untuk melindungi nelayan kecil. Namun, implementasi kebijakan tersebut belum sepenuhnya di rasakan oleh para nelayan, terutama nelayan perempuan (Rostiyati, 2018:188).

Masyarakat pesisir yang didominasi oleh usaha perikanan pada umumnya masih berada pada garis kemiskinan, mereka tidak mempunyai pilihan mata pencaharian, memiliki tingkat pendidikan yang rendah, tidak mengetahui dan menyadari kelestarian sumber daya alam. Lingkungan alam sekitar akan membentuk sifat dan perilaku masyarakat. Lingkungan fisik dan biologi memengaruhi interaksi sosial, distribusi peran sosial, karakteristik nilai, norma sosial, sikap serta persepsi yang melembaga dalam masyarakat. Mereka menjadi pelaku utama dalam pembangunan kelautan dan perikanan, serta pembentuk suatu budaya dalam kehidupan masyarakat nelayan.Beberapa indikator kualitatif bahwa suatu masyarakat nelayan

memiliki keberdayaan, menurut Wrihatnolo dan Dwidjowijoto (2007:25) adalah sebagai berikut:

1. Tercapainya kesejahteraan sosial ekonomi: individu, rumah tangga, dan masyarakat, yang di tandai dengan hal-hal sebagai berikut:
   a. Kemandirian ekonomi berkembang dan orientasi kewirausahaan meningkat
   b. Nilai tabungan dan investasi bertambah
   c. Kebutuhan primer dan sekunder terpenuhi, optimal dan berkelanjutan
2. Kelembagaan ekonomi berfungsi optimal dan aktivitas ekonomi stabil kontinuitasnya
3. Kelembagaan sosial berfungsi dengan baik sebagai instrument pembangunan sosial
4. Berkembangnya kemampuan akses masyarakat terhadap sumberdaya ekonomi; informasi, capital, pasar, dan teknologi.

Kebutuhan memanajemeni pemberdayaan masyarakat relevansinya dalam upaya pemerintah dalam menanggulangi kemiskinan. Masalah kemiskinan menjadi perbincangan banyak pihak karena kemiskinan merupakan permasalahan multi-sektoral dan menjadi tanggung jawab semua pihak baik dari tingkat kementerian atau lembaga maupun individu masyarakat. Masalah kemiskinan hanya dapat dituntaskan apabila pemerintah melakukan kebijakan serius yang memihak kepada keluagra miskin. Pada dasarnya, kemiskinan masyarakat nelayan sukar diubah, perlu ada komitemen yang lebih nyata dari pemerintah dan daerah antar pelaku program untuk bersama sama mengatasi masalah kemiskinan ini. Ada beberapa pendekatan yang bisa dipakai dalam penanggulangan kemiskinan masyarakat nelayan menurut (Wrihatnolo dan Dwidjowijoto,2007:15) sebagai berikut:

1. Penciptaan lapangan pekerjaan yang akternatif sebagai sumber lain dari pendapatan keluarga
2. Mendekatkan masyarakat dengan pasar
3. Adanya sosialisai tentang penggunaan teknologi yang lebih berdaya guna
4. Mendekatkan masyarakat dengan sumber modal dengan penekanan pada penciptaan mekanisme madani diri sndri

Masalah kemiskinan dan kainginan untuk berevolusi masih harus menjadi perhatian penting bagi masyarakat nelayan. Dengan kelima pendekatan ini, apabila dilaksanakan dan diterapkan secara bersungguh-sungguh tersadar akan aspirasi, kebutuhan, keinginan, pendapatan, dan potensi sumberdaya di masyarakat maka pemberdayaan masyarakat nelayan dapat menuju kesejahteraan.

2.3 Strategi Pemberdayaan

Strategi merupakan suatu cara atau alat untuk mencapai sesuatu yang di inginkan. Strategi pemberdayaan adalah suatu alat untuk mencapai suatu tujuan kesejahteraan baik bagi masyarakat maupun bagi pemerintah sebagai fasilitator dari kesejahteraan tersebut. Pemberdayaan yang di fokuskan kepada masyarakat dalam mengelola TPI diukur dari keberhasilan program dan kebijakan pembangunan yang lebih menonjolkan indikator ekonomi. Karena di buktikan dengan adanya pertumbuhan ekonomi yang di jadikan sebagai ukuran dari keberhasilan pembangunan (pemberdayaan masyarakat setempat). Namun dengan adanya keterpurukan ekonomi yang di alami oleh negara kita, berakibat pada tertutupnya keterlibatan masyarakat secara penuh dalam berbagai proses politik lainnya. Sedangkan partisipasi masyarakat merupakan dedikasi penuh untuk mengontrol, mengawasi, dan mengawal program pembangunan dan kebijakan yang sasarannya adalah kepentingan masyarakat (Hajar dkk, 2018:51).

Pendekatan yang di gunakan dalam srategi pemberdayaan masyarakat ini adalah pendekatan kepada kelembagaan dan masyarakat dengan mengajak masyarakat untuk partisipatif dalam kegiatan yang berbasis pemberdayaan karakteristik sumberdaya lingkungan dan sosial-budaya komuniti lokal (Kusnadi dkk 2013:8). Ada beberapa Strategi yang dapat menjadi pertimbangan untuk di pilih dan kemudian di terapkan dalam pemberdayaan masyarakat nelayan, yaitu:

a. *Empowering,* yaitu meningkatkan kapasitas atau kemampuan dari masyarakat dengan memperkuat potensi atau daya yang di miliki.

b. *Enabling*, menciptakan suasana atau iklim yang memungkinkan masyarakat bisa berkembang. Artinya, bahwa setiap manusia adalah masyarakat yang bisa berkembang dan mempunyai potensi yang bisa di kembangkan.
c. *Protecting*, yaitu melindungi kepentingan masyarakat dengan mengembangkan sistem perlindungan yang tertuju bagi masyarakat yang menjadi subjek pengembangan.

2.4 Indikator Keberdayaan

Indikator keberdayaan adalah, suatu ukuran dari keberhasilan program pemberdayaan yang dilakukan. Untuk mengetahui fokus dan tujuan pemberdayaan secara operasional maka perlu diketahui beberapa indikator keberdayaan, khususnya keberdayaan dalam bidang ekonomi yang dapat menunjukkan seseorang atau masyarakat, secara umum dapat dilihat dari keberdayaan mereka dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari (Wrihatnolo dan Dwidjowijoto 2007:25). Secara lebih rincinya ada beberapa indicator keberhasilan program pemberdayaan ekonomi, yaitu:

a. Berkurangnya jumlah penduduk miskin.
b. Berkembangnya usaha peningkatan pendapatan yang dilakukan oleh penduduk miskin dengan memanfaatkan sumberdaya yang tersedia.
c. Meningkatnya kepedulian masyarakat terhadap upaya peningkatan kesejahteraan keluarga miskin dilingkungannya.
d. Meningkatnya kemandirian kelompok yang ditandai dengan makin berkembangnya usaha produktif anggota dan kelompok, makin kuatnya permodalan kelompok, makin rapinya sistem administrasi kelompok, serta makin luasnya interaksi kelompok dengan kelompok lain di masyarakat.
e. Meningkatnya kapasitas dan pemerataan pendapatan yang ditandai oleh peningkatan pendapatan keluarga miskin yang mampu memnuhi kebutuhan pokok dan kebutuhan sosial dasarnya.

2.5 Fungsi Pemerintah dalam Pemberdayaan

Kehadiran dan keberadaan pemerintah di maksudkan untuk melayani masyarakat.Pemerintah memiliki kewajiban untuk melayani masyarakat dalam meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan dari masyarakat itu. Sejak jaman dahulu, sejarah membuktikan bahwa masyarakat sekecil apapun kelompoknya, bahkan sebagai individu sekalipun tetap membuthkan layanan pemerintah dalam kehidupannya. Oleh karena itu, kehidupan sehari-hari masyarakat sangat erat kaitannya dengan fungsi dari pemerintah dan pemerintahan.Pemerintahan adalah *Besctuurvoering* atau pelaksanaan tugas pemerintah.Sedangkan pemerintah adalah organ atau alat yang menjalankan pemerintahan. Hal ini seiring dengan definisi pemerintah. Pemerintah itu adalah organisasi yang memiliki kewenangan untuk membuat kebijakan dalam bentuk penerapan hukum, dan undang-undang di suatu negara dan bertugas mengelola sistem pemerintahan dalam mencapai tujuan negara Ridwan HR (dalam Maryani & Nainggolan, 2019:17).

Fungsi pemerintah dalam pemberdayaan yang arti pembenerdayaan disini di maknai dan sama dengan pembangunan bagi masyarakat, jadi peran pemerintah dalam pemberdayaan itu sama dengan peran pemerintah dalam mewujudkan pembangunan. Untuk mencapai tujuannya, paling tidak pemerintah pusat maupun pemerintah daerah harus menjalankan tiga fungsi yaitu: “Fungsi pengaturan, fungsi pelayanan dan fungsi pemberdayaan” (Maryani & Nainggolan, 2019:20-24).

1. Fungsi Pengaturan

   Fungsi ini menekankan bahwa pengaturan tidak hanya berlaku kepada rakyat namun juga kepada pemerintah sendiri.Dalam hal ini berkaitan dengan hak pemerintah dalammembuat peraturan perundang-undangan yang berguna untuk mengatur hubungan manusia dalam bermasyarakat dan mengatur dengan pemerintah itu sendiri. Kebijakan yang ditetapkan juga bisa mengatur kehidupan masyarakat sekaligus meminimalkan intervensi negara dalam kehidupan bermasyarakat.

Fungsi pengaturan yang di laksanakan pemerintah antara lain:

a. Menyediakan infrastruktur ekonomi
b. Menyediakan barang dan jasa kolektif
c. Menjembatani konflik dalam masyarakat
d. Menjaga kompetisi
e. Menjamin akses minimal setiap individu kepada barang dan jasa
f. Menjaga stabilitas ekonomi

2. Fungsi Pelayanan

Yang di maksud dengan fungsi pelayanan adalah segala pelayanan yang mencangkup pelaksanaan tugas negara dalam melayani warga negara melalui organ pemerintah dan aparat pemerintah. Aparat menjalankan amanah yang tertuang dalam undang-undang dalam menciptakan kesejahteraan dan kemakmuran warga negara Indonesia. Ditinjau dari konteks implementasi fungsi pemerintah, pelayanan dapat dikategorikan sebagai upaya dalam menyiapkan, menyediakan, atau mengurus kepentingan warga masyarakat.

Sesuai dengan pasal 4 Undang-undang Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, menyatakan bahwa dalam rangka upaya memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat terdapat asas-asas yang harus di jadikan pedoman dalam pelayanan publik oleh aparat pemerintah, di antaranya:

a. Kepentingan umum:
b. Kepastian hukum:
c. Kesamaan hak:
d. Keseimbangan hak dan kewajiban:
e. Keprofesionalan:
f. Partisipatif:
g. Persamaan perlakuan tidak diskriminatif:
h. Keterbukaan:
i. Akuntabilitas:
j. Fasilitas dan perlakuan khusus bagi kelompok rentan:

k. Ketepatan waktu:

l. Kecepatan, kemudahan dan keterjangkauan:

3. Fungsi pemberdayaan

   Peranan dan fungsi pemerintah dalam menetapkan kebijakan dan program pemberdayaan masyarakat sangat menentukan hasil dan keberhasilan dari implementasi pemberdayaan masyarakat. Upaya pemberdayaan masyarakat membutuhkan strategi implementasi langkah yang nyata agar berhasil mencapai sasarna dan tujuannya. Pemberdayaan masyarakat perlu di tempatkan pada arah yang benar, yaitu di tujukan kepada peningkatan kapasitas masyarakat *(capacity and building).*

2.6 Definisi Pengelolaan

Pengelolaan dalam kamus besar bahasa Indonesia Pengelolaan mempunyai arti proses, cara, perbuatan mengelola atau proses melakukan kegiatan tertentu dengan menggerakkan tenaga orang lain, dan atau proses yang memberikan pengawasan pada semua hal yang terlibat dalam pelaksanaan kebijaksanaan dan pencapaian tujuan. Pengelolaan adalah suatu istilah yang berasal dari kata “Kelola” mengandung arti serangkaian usaha yang bertujuan untukmenggali dan memanfaatkan segala potensi yang di miliki secara efektif dan efisien guna mencapai tujuan tertentu yang telah di rencanakan sebelumnya Harsoyo (dalam Rizkia, 2019:38).

Pengelolaan perikanan menurut Undang-undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan dan semua upaya termasuk proses yang terintergrasi dalam pengumpulan informasi, analisis, perencanaan, konsultasi, pembuatan keputusan, alokasi sumber daya ikan dan implementasi serta penegakkan hukum dari Peraturan Perundang-undangan di bidang perikanan, yang di lakukan oleh pemerintah atau otoritas lain yang di arahkan untuk mencapai kelangsungan produktifitas sumber daya hayati perairan dan tujuan yang disepakati.

Dari uraian diatas maka penulis dapat menyimpulkan bahwa yang di maksud dengan pengelolaan adalah suatu rangkaian kegiatan yang berintikan perencanaan, pengorganisasian, pergerakkan dan pengawasan yang bertujuan menggali dan memanfaatkan sumber daya yang di miliki secara efektif untuk mencapai tujuan organisasi yang telah di tentukan.

2.7 Konsep Manajemen Pemberdayaan

Manajemen dalam arti sederhana yaitu suatu pengelolaan terhadap sesuatu agar berguna bagi pemenuhan kebutuhan dan pencapaian tujuan. Para pakar manajemen pada umumnya menyebutkan bahwa manajemen adalah suatu pekerjaan yang melibatkan adanya ilmu, seni, fungsi dan tindakan-tindakan yang harus dilakukan untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Manajemen dapat diartikan sebagai suatu kegiatan atau pekerjaan proses pengelolaan sumber daya dan dana secara berkesinambungan dan berkelanjutan untuk mencapai suatu tujuan atau produk sesuai yang direncanakan. Manajemen merupakan proses yang khas yang terdiri dari tindakan perencanaan, pengorganisasian, penggerakan dan pengendalian. Proses itu dilakukan untuk menentukan dan mencapai sasaran-sasaran yang telah ditentukan melalui pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber daya lainnya (Amri dan Ferizko,2020:229).

Untuk memperjelas arti manajemen, berikut ini di kutip dari beberapa ahli bidang manajemen, (Sukmadi,2017:20-21) :

a. John D. Millet

   "Management is the process of directing and facilitating the work of people organized in formal group to achieve a desired goal" Manajemen adalah proses memimpin dan melancarkan pekerjaan dari orang-orang yang terorganisir secara formal sebagai kelompok untuk memperoleh tujuan yang di inginkan (Sukmadi,2017:20).

b. George R. Terry

   "Manangement is distinct process consisting of planning, organizing, actuating, controlling, utilizing in each both science and art follow in order to accomplish predetermined objectives." Manajemen adalah proses yang

khas yang terdiri atas tindakan-tindakan planning, organizing, actuating, dan controlling. Dimana pada masing-masing bidang di gunakan, baik ilmu pengetahuan maupun keahlian dan yang di ikuti secara berurutan dalam rangka usaha mencapai sasaran yang telah di tetapkan semula (Sukmadi,2017:21).

Kesimpulan yang dapat di tarik dari kesamaan-kesamaan yang terdapat dalam berbagai macam definisi di atas adalah Manajemen selalu di terapkan dalam hubungan dengan usaha suatu kelompok manusia dan tidak terhadap sesuatu usaha satu orang tertentu. Secara singkat dapat di katakana, manajemen adalah persoalan mencapai suatu tujuan tertentu dengan suatu kelompok orang-orang (Sukmadi, 2017:23).

Jadi, dalam proses manajemen mencakup perencanaan (*planning*), pengorganisasisan *(organizing*), penggerakan (*actuating)* dan pengendalian (*controlling*). Semuanya saling memiliki keterkaitan, misalnya satu saja dari empat hal tersebut tidak terlaksana dengan baik maka akan berdampak kepada proses manajemen secara keseluruhan. Apalagi dalam proses pemberdayaan masyarakat, hal ini memiliki kompleksitas yang tinggi sesuai dinamika masalah di masyarakat, seperti pendidikan, kemiskinan dan kebudayaan. Oleh sebab, itu dalam hal perencanaan segala aspek tersebut harus di pertimbangkan supaya dalam pengorganisasisan dan pelaksanaan terdapat keselarasan dengan memilih solusi yang paling tepat dengan masalah yang sudah di tetapkan, sehingga dalam pengendalian tidak menenemukan masalah baru yang dapat menghambat proses manajamen secara keseluruhan yang mengganggu tercapainya tujuan.

Manajemen dapat didefinisikan sebagai seni dan ilmu sebagai alat untuk melakukan proses pengelolaan sumber daya dan dana melalui mekanisme fungsional dalam rangka melaksanakan berbagai kegiatan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan lebih dahulu. Setiap pembicaraan manajemen dan aplikasinya akan melekat didalamnya dua hal yaitu organisasi dan administrasi. Hal itu berangkat dari suatu kondisi pragmatis bahwa setiap pelaksanaan

manajemen berada dalam organisasi tertentu dengan sistem administrasi tertertu pula.

Organisasi adalah wadah kerjasama antar dua orang atau lebih, sedangkan administrasi proses pencatatan kegiatan dari kelompok yang mengadakan kerjasama untuk meyelesaiakan tujuan bersama. Artinya dalam kegiatan organisasi yang bersifat konstruktif atau membangun, penting adanya proses yang terncana, dengan adanya perencanaan di harapkan mampu meminimalisir hal-hal yang tidak di inginkan serta memaksimalkan segala potensi yang tersedia, dengan prinsip efektif dan efisien. Begitupun dalam hal menggerakkan potensi tersebut hingga proses pengendaliannya,semua harus terencana dengan baik. Sedangkan pemberdayaan masyarakat pada hakekatnya adalah membuat masyarakat lebih berdaya, baik dari segi sumber daya manusia, keuangan, manajemen, akses, dan lain sebagainya. Banyak program pemberdayaan yang telah dilakukan. Penulis bersama-sama dengan peneliti yang lain telah melakukan banyak penelitian untuk mengembangkan program pemberdayaan, baik untuk mahasiswa, pemuda desa, kelompok masyarakat produktif, maupun masyarakat secara umum (Amri dan Ferizko,2020:230).

Manajemen Pemberdayaan Masyarakat adalah suatu konsep bahwa meskipun kehidupan itu adalah proses alami, kehidupan pun perlu dan harus dimanajemeni. Konsep “memanajemeni” berbeda dengan “rekayasa” karena manajemen lebih fokus pada peningkatan “nilai tambah” dari “suatu asset”. Jadi, pemberdayaan bukanlah semata-mata konsep politik, melainkan lebih pada suatu konsep manajemen. Sebagai konsep manajemen pada akhirnya pemberdayaan harus mempunyai indikator keberhasilan yaitu, (a) penyadaran, (b) pengkapasitasan, dan (c) pendayaan (Wrihatnolo dan Dwidjowijoto, 2007:9).

2.8 Kerangka Pikir

Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Selain merupakan pintu gerbang bagi nelayan dalam memasarkan hasil tangkapannya, juga menjadi tempat mencari nafkah warga di sekitar TPI tersebut dengan berdagang, selain itu TPI di desa Muara

Gading Mas juga menjadi tempat memperbaiki jaring, motor laut, dan juga kapal dalam persiapan operasi penangkapan ikan. Tujuannya di dirikan TPI adalah untuk menarik sejumlah pembeli sehingga nelayan dapat menjual hasil tangkapannya sesegera mungkin dengan harga yang baik serta dapat menciptakan perasaan yang sehat melalui lelang murni.Disamping itu secara fungsional, sasaran yang di harapkan di TPI adalah tersedianya ikan bagi kebutuhan penduduk sekitarnya dengan kualitas yang baik serta hidupnya kembali sistem lelang murni yang sudah lama mati, sarana dan prasarana yang memadai juga menjadi hal yang perlu di perhatikan. Hal ini harus melalui perbaikan manajemen pengelolaan dalam TPI yang akan menghasilkan suatu Strategi Pemberdayaan dalam Pengelolaan Tempat Pelelangan Ikan, dan dapat mensejahterakan nelayan serta menjadikan tempat pelelangan ikan sebagai sumber Pendapatan Asli Daerah.

Oleh karena itu, untuk mengetahui dan menghasilkan suatu strategi dalam memberdayakan dan meningkatkan manajemen pengelolaan yang baik maka diperlukan pengelolaan yang terstruktur dan Peneliti menggunakan konsep Manajemen Pemberdayaan sebagai acuan pengelolaan yang baik konsep ini dikemukakan oleh Wrihatnolo dan Dwidjowijoto (2007:9). Konsep ini digunakan agar pengelolaan TPI dapat optimal, serta mengukur Pemberdayaan masyarakat oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Lampung dengan menggunakan Prinsip-prinsip Pemberdayaan. Untuk menjadikan Pengelolaan sebuah Tempat Pelelangan Ikan yang ideal diperlukan prinsip kesetaraan yang baik untuk di jadikan pedoman pelaksanaan serta dalam melakukan program pemberdayaan,Kemudian Prinsip partisipasi menentukan, mengelompokkan, dan mengatur berbagai macam aktivitas yang diperlukan untuk mencapai tujuan memerlukan partisipasi. Prinsip kemandirian mengarahkan semua agar mau bekerja sama dalam mengelola Tempat Pelelangan Ikan dan masyarakat dapat mandiri. Yang terakhir adalah Prinsip berkelanjutan pengukuran dan perbaikan terhadap pelaksanaan kerja serta menciptakan program yang berkelanjutan, agar rencana-rencana yang telah di buat untuk mencapai tujuan-tujuan dapat terselenggarakan. Maka untuk mempermudah memahami alur nya peneliti menggambaran kerangka berfikirnya sebagai berikut seperti pada gambar 1 di bawah:

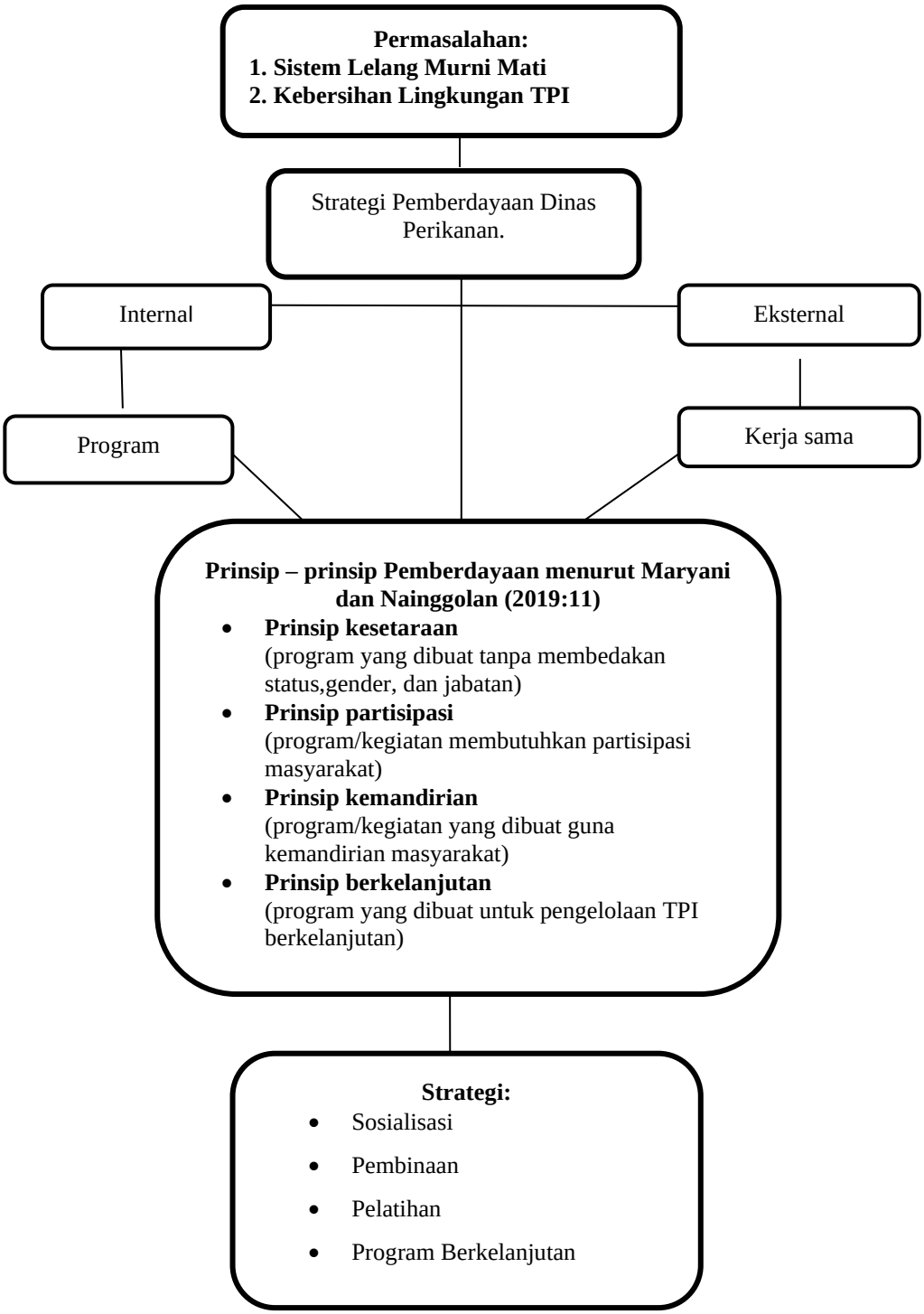

Gambar 1. Kerangka Pikir
(Sumber: Diolah Oleh Peneliti, 2020)

III. METODE PENELITIAN

3.1 Tipe Penelitian

Penelitian ini mengkaji tentang Strategi Pemberdayaan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Lampung dalam Pengelolaan Tempat Pelelangan Ikan di Desa Muara Gading Mas, Kabupaten Lampung Timur. Tipe yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Penelitian deskriptif merupakan penelitian yang mempelajari masalah-masalah dalam masyarakat serta situasi-situasi, termasuk tentang hubungan, kegiatan-kegiatan, sikap-sikap, pandangan-pandangan, serta proses-proses yang sedang berlangsung dan pengaruh-pengaruh dari suatu fenomena. Pengumpulan data tidak dipandu oleh teori tetapi di pandu oleh fakta-fakta yang ditemukan pada saat penelitian di lapangan. Oleh karena itu, analisis data yang di lakukan dan kemudian dapat di konsentrasikan menjadi hipotesis atau teori. Dengan demikian, dalam penelitian yang menggunakan pendekatan kualitatif, analisis data dilakukan untuk membangun hipotesis dan teori.

Jenis penelitian dengan pendekatan Kualitatif menurut Anggito dan Setiawan (2018:8) “Penelitian Kualitatif adalah Pengumpulan data pada suatu latar ilmiah dengan maksud menafsirkan fenomena yang terjadi dimana peneliti adalah sebagain instrument kunci, secara holistikdan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah”. Permasalahan yang akan dikaji oleh peneliti merupakan yang bersifat sosial dan dinamis, oleh karena itu peneliti memilih menggunakan metode Penelitian Kualitatif untuk menentukan cara mencari, mengumpulkan,mengolah dan menganalisis data hasil penelitian tersebut. Penelitian kualitatif ini dapat digunakan untuk

memahami interaksi sosial, misalnya dengan wawancara mendalam sehingga akan di temukan pola-pola yang jelas.

Anggito dan Setiawan (2018:8-9) menjelaskan "Penelitian kualitatif banyak digunakan dalam bidang kajian sosial. Penelitian kualitatif merupakan suatu penelitian yang hasil penelitiannya tidak di peroleh melalui prosedur statistik atau metode kuantifikasi yang lain. Peneliti biasanya menggunakan pendekatan naturalistik untuk memahami suatu fenomena tertentu. Penelitian kualitatif berusaha mendapatkan pencerahan, pemahaman, terhadap suatu fenomena dan ekstrapolasi pada situasi yang sama". Penelitian kualitatif tidak menggunakan statistik, tetapi melalui pengumpulan data, analisis kemudian di interprestasikan. Biasanya berhubungan dengan masalah sosial dan manusia yang bersifat *interdisipliner*, fokus pada *multimethod*, *naturalistic* dan *interpretatif* (dalam pengumpulan data, paradigm, dan interpretasi). Penelitian kualitatif ini merupakan penelitian yang menekankan pada pemahaman yang mengenai masalah-masalah dalam kehidupan sosial berdasarkan kondisi realitas dan *natural setting* yang holistis, kompleks dan rinci. Penelitian yang menggunakan pendekatan induksi yang mempunyai tujuan penyusunan konstruksi teori atau hipotesis melalui pengungkapan fakta merupakan penelitian yang mengguakan paradigma kualitatif.

3.2 Fokus Penelitian

Fokus penelitian bertujuan untuk membatasi penelitian kualitatif agar peneliti tidak terjebak dalam beragam data yang didapatkan. Fokus penelitian dapat membantu penulis dalam menyaring data-data yang relevan dengan pertanyaan penelitian dalam rumusan masalah. Penelitian ini berfokus pada Strategi Pemberdayaan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Lampung dalam Pengelolaan Tempat Pelelangan Ikan di Desa Muara Gading Mas Lampung Timur, untuk melihat strategi pemberdayaan dan pengelolaan apa saja yang di terapkan untuk mengoptimalkan Pengelolaan TPI Desa Muara Gading Mas, adalah dengan mengukur keberhasilan strategi yang dilakukan dalam pengelolaan TPI berdasarkan pengelolaan yang baik menurut prinsip-prinsip

pemberdayaan yaitu, (a) prinsip kesetaraan, (b) prinsip partisipasi, (c) prinsip kemandirian, (d) prinsip berkelanjutan yang dikemukakan oleh Maryani dan Nainggolan (2019:11) adapun indaktor fokus penelitiannya sebagai berikut:

1. Prinsip Kesetaraan (Sosialisasi). untuk menghasilkan pengelolaan TPI yang ideal dan suatu strategi pemberdayaan maka diperlukan kesetaraan atau kesejajaran kedudukan antara masyarakat dan lembaga yang baik untuk dijadikan pedoman pelaksanaan dalam melakukan program pemberdayaan. Prinsip ini mengukur program atau kegiatan yang dibuat dengan setara atau tidak membedakan masyarakat berdasarkan jenis kelamin maupun tingkatan lainnya hal ini diwujudkan melalui sosialisasi oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Lampung dalam memberikan informasi terkait pemberdayaan baik kepada masyarakat ataupun dalam pengelolaan Tempat Pelelangan Ikan.
2. Prinsip Partisipasi (Pembinaan), yaitu dengan menentukan, mengelompokkan, dan mengatur berbagai macam aktivitas yang diperlukan untuk mencapai tujuan pemberdayaan membutuhkan partisipasi dari masyarakat. Pada prinsip ini Peneliti mengukur Strategi dari Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Lampung dengan pembinaan atau kegiatan yang dilakukan menggunakan tingkat partisipasi dari masyarakat nelayan di Desa Muara Gading Mas.
3. Prinsip Kemandirian (Pelatihan), mengarahkan semua baik masyarakat ataupun lembaga agar dapat bekerja sama dalam mengelola TPI, dengan demikian masyarakat dapat mandiri. Mengarahkan dalam prinsip kemandirian yaitu memberikan inovasi pada SDM dan SDA yang ada guna membuat masyarakat yang diberdayakan dapat menjadi mandiri dengan memberikan pelatihan bagi masyarakat nelayan ataupun masyarakat di sekitar TPI Higenis yang terletak di Desa Muara Gading Mas.
4. Prinsip Berkelanjutan (Program Berkelanjutan) dalam prinsip ini diterapkan dalam bentuk program yang dirancang dapat berkelanjutan. Berkelanjutan dalam hal ini adalah mengoptimalkan pemanfaatan Sumber Daya Manusia dan Sumber Daya Alam yang ada. Pengukuran dan perbaikan pelaksanaan kerja serta menciptakan program yang berkelanjutan agar rencana-rencana yang telah dibuat untuk mencapai tujuan dapat terselenggarakan.

3.3 Informan Penelitian

Informasi di dalam suatu penelitian bisa berasal dari berbagai hal. Orang yang memberikan informasi terhadap sesuatu hal atau terkait penelitian disebut jugadengan informan atau dapat dikatakan sebagai sampel. Selain itu peneliti juga memahami sumber data maupun kencah penelitian secara verstehen.Verstehen adalah cara memahami situasi yang ditemui dilapangan. Pemilihan informan sebagai sumber data dalam penelitian ini adalah berdasarkan pada asas subjek yang menguasai permasalahan, memiliki data, dan bersedia memberikan imformasi lengkap dan akurat. Informan penelitian terdiri dari informan kunci (*key informan*), yaitu mereka yang mengetahui dan memiliki informasi pokok yang diperlukan dalam penelitian, dalam penelitian ini yang menjadi informan kunci adalah (Anggito dan Setiawan 2018:76).

Tabel 7. Data Informan

No.	Nama	Jabatan
1.	Dra. Rita Aprilianti, M.M	Kepala Bidang Perikanan Tangkap Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Lampung
2.	Arif Kurniawan H, S.Pi	Kepala Sub Bagian Perencanaan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Lampung
3.	Sukarsono, S.Pi	Kepala UPTD PPP Labuhan Maringgai
4.	Zainal K,S.Pi, M.Ling	Syahbandar PPP Labuhan Maringgai
5.	Dedy Sukma S, S.St.Pi.,MM	Kasi Pelabuhan Perikanan Pantai Labuhan Maringgai
6.	Ibnu Burmi	Manager TPI Higenis Labuhan Maringgai
7.	Arif Buston	Ketua Nelayan
8.	Arifin	Pembina
9.	Ibu Naseb dan Sutiro	Pengecer/ Masyarakat nelayan

(Sumber: Diolah oleh Penulis, 2020)

3.4 Jenis Data

Secara umum data di bedakan menjadi dua yakni data primer dan data sekunder. Menurut Anggito dan Setiawan (2018:75) bila dilihat dari sumber datanya, maka pengumpulan data dapat menggunakan sumber primer dan sumber sekunder. Sumber primer adalah sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data sedangkan sumber sekunder merupakan sumber yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data, misalnya lewat orang lain atau dokumen. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan gabungan dari :

3.4.1 Data Primer

Arikunto (2010: 22) mengemukakan bahwa "Data primer adalah data dalam bentuk verbal atau kata-kata yang diucapkan secara lisan, gerak-gerik atau perilaku yang dilakukan oleh subjek yang dapat dipercaya, yakni subjek penelitian atau informan yang berkenaan dengan *variable* yang diteliti atau data yang diperoleh dari responden secara langsung". Data primer diperoleh peneliti dengan cara menggali informasi langsung dari pihak yang terkait. Data-data tersebut merupakan bahan analisis utama yang digunakan dalam penelitian ini dan pengamatan di lokasi penelitian. Keterangan informasi pengambilan data primer peneliti sajikan dalam bentuk tabel sebagai berikut:

Tabel 8. Keterangan Pengambilan Data Primer Penelitian

No.	Nama Informan	Instrumen	Waktu Pengambilan Data Primer
1.	Ibnu Burmi	Wawancara	25 Maret 2021
2.	Arif Buston	Wawancara	
3.	Arifin	Wawancara	
4.	Ibu sutiro dan Naseb	Wawancara	
5.	Dra. Rita Aprilianti, M.M	Wawancara	29 Maret 2021
6.	Zainal K,S.Pi, M.Ling	Wawancara	
7.	Sukarsono, S.Pi	Wawancara	05 April 2021
8.	Dedy Sukma S, S. St.,Pi, M.M	Wawancara	
9.	Arif Kurniawan H, S.Pi	Wawancara	09 Juni 2021

(Sumber : Diolah oleh Peneliti, 2021)

Teknik pemilihan orang yang akan diwawancarai dilakukan secara purposive atau ditentukan dengan sengaja. Alasan pemakaian teknik purposive disebabkan oleh bentuk dan ciri penelitian ini yaitu untuk mendapatkan informasi-informasi yang sesuai dengan tujuan dari pelaksanaan penelitian ini dan alasan pemilihan informan berdasarkan pada asas subjek yang menguasai permasalahan, memiliki data, dan bersedia memberikan informasi lengkap dan akurat .

3.4.2 Data Sekunder

Data sekunder merupakan data pendukung yang diperoleh dari sumber-sumber yang ada berupa literatur dan dokumen. Data sekunder juga diperlukan untuk melengkapi informasi dalam rangka mencocokkan data yang diperoleh. Sumber data sekunder yang digunakan antara lain berupa website, dokumen-dokumen yang didapat peneliti dari Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Lampung, artikel, skripsi dan jurnal. Keterangan informasi pengambilan data sekunder peneliti sajikan dalam bentuk tabel sebagai berikut:

Tabel 9. Keterangan Pengambilan Data Sekunder Penelitian

No.	Keterangan Informasi Data Sekunder	Sumber Data	Waktu Pengambilan Data Sekunder
1.	Data Kondisi mata pencaharian masyarakat Desa Muara Gading Mas.	Kantor Kecamatan Desa Muara Gading Mas	25 Maret 2021
2.	Gambaran Umum dan Struktur Organisasi Desa MGM	Kantor Kecamatan Desa Muara Gading Mas	25 Maret 2021
3.	Gambaran Umum dan Struktur Organisasi TPI Higenis	UPTD Tempat Pelelangan Ikan Desa Muara Gading Mas	25 Maret 2021
4.	Data Program Pembinaan yang telah berlangsung dari 2018-2020	Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Lampung	29 Maret 2021
5.	Data Rencana Program Pengelolaan TPI Higenis Tahun 2021	Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Lampung	29 Maret 2021
6.	Gambaran Umum dan Struktur Organisasi Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Lampung	Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Lampung	29 Maret 2021

(Sumber : Diolah oleh Peneliti, 2021)

3.5 Teknik Pengumpulan Data.

Teknik pengumpulan data merupakan cara yang dilakukan oleh peneliti untuk mengumpulkan dan mendapatkan data dalam penelitian. Penelitian ini merupakan penelitian yang berjenis kualitatif maka data yag diperoleh haruslah mendalam, jelas dan spesifik. Pengumpulan data dapat diperoleh dari hasil observasi, wawancara, dokumentasi, dan gabungan/triangulasi. Pada penelitian ini peneliti menggunakan teknik pengumpulan data dengan cara observasi, dokumentasi, dan wawancara (Sugiyono, 2009: 225).

3.5.1 Wawancara

Silaen dan Widiyono (2013:153) mendefinisikan "Wawancara adalah alat pengumpulan data yang digunakan dalam komunikasi langsung yang berbentuk sejumlah pertanyaan lisan yang diajukan penelitian ini, melakukan wawancara secara langsung untuk memperoleh data dari informan terkait dengan fokus penelitian, sehingga sasaran yang akan diwawancarai adalah pihak-pihak yang terkait dengan permasalahan yang dijadikan sumber data". Adapun tahapan wawancara yang dilakukan adalah dengan melakukan perjanjian waktu wawancara lalu setelah itu turun lapangan menuju lokasi dan menemui informan. Peneliti melakukan wawancara berdasarkan panduan wawancara yang telah dibuat dan melakukan wawancara dengan narasumber yang mengetahui serta menguasai permasalahan di lapangan. Panduan wawancara disusun berdasarkan fokus penelitian agar wawancara terarah dan tidak menyimpang. Adapun informan yang di wawancarai dalam penelitian ini dijelaskan dalam tebel 10 sebagai berikut:

Tabel 10. Kegiatan Wawancara

No.	Informan	Tempat	Waktu
1.	Masyarakat Nelayan, Ketua Nelayan, Pembina dan Manager TPI Higenis	TPI Higenis Desa Muara Gading Mas	25 Maret 2021
2.	Kepala Bidang Perikanan Tangkap Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Lampung	Kantor Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Lampung	29 Maret 2021
3.	Syahbandar PPP Labuhan Maringgai	Kantor Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Lampung	29 Maret 2021
4.	Kepala UPTD PPP Labuhan Maringgai dan Kasi Pelabuhan Perikanan Pantai Labuhan Maringgai	Kantor UPTD PPP Labuhan Maringgai	05 April 2021
5.	Kepala Sub Bagian Perencanaan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Lampung	Kantor Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Lampung	09 Juni 2021

(Sumber : Diolah oleh Peneliti, 2021)

3.5.2 Dokumentasi

Menurut Nawawi (2001: 111), “Dokumen yang berupa tulisan ataupun film bagi peneliti dapat digunakan untuk diproses (melalui pencatatan, pengetikan, atau alat tulis), tetapi kualitatif tetap menggunakan katakata, yang biasanya disusun ke dalam teks yang diperluas”. Teknik dokumentasi pada penelitian ini dengan cara mengumpulkan data melalui peninggalan tertulis. Serta Dokumentasi yang berupa catatan peristiwa yang sudah berlalu dan terjadi. Dokumentasi yang diperoleh oleh peneliti berupa foto,gambar, dan arsip-arsip dokumentasi. Dokumentasi tersebut berdasarkan dari kegiatan TPI yang setiap harinya menjadi pusat perekonomian warga sekitar, foto dokumentasi pelatihan penanganan rajungan di miniplan yang dilakukan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Lampung, penerapan pembinaan CPIB, kondisi TPI Higenis yang kotor, dan dokumentasi peneliti dengan narasumber. Dengan begtu hasil penelitian dari wawancara dan observasi akan semakin sah dan dapat di percayai apabila didukung dengan dokumentasi.

3.5.3 Observasi

Menurut Sugiyono (2016: 204) “observasi merupakan kegiatan pemuatan penelitian terhadap suatu objek”. Apabila dilihat pada proses pelaksanaan pengumpulan data observasi dibedakan menjadi partisipan dan non-partisipan. Dalam penelitian ini, observasi yang dilakukan oleh peneliti yaitu dengan cara melakukan pengamatan dengan melakukan turun lapangan dan melihat kondisi secara langsung, objek penelitian secara langsung di TPI Higenis dan kantor UPTD yang terletak di Desa Muara Gading Mas dan mencari data informasi di Kantor Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Lampung. Observasi yang digunakan pada penelitian ini adalah observasi non-partisipan. Dalam melakukan observasi, peneliti memilih hal-hal yang diamati dan mencatat hal-hal yang berkaitan dengan penelitian. Observasi yang dilakukan pada penelitian ini adalah pada proses belajar.

3.6 Teknik Pengolahan Data

Setelah data yang diperoleh dari lapangan terkumpul, tahap selanjutnya yang perlu dilakukan adalah mengolah data tersebut. Adapun kegiatan pengolahan data dalam penelitian ini menurut Singarimbun & Effendi (2006: 278) adalah sebagai berikut:

3.6.1 Editing

Pada proses editing, peneliti melakukan pemeriksaan kembali datayang telah diperoleh selama melaksanaan penelitian. Pelaksanaan editing dilakukan dengan memeriksa data yang diperoleh dari hasil melakukan wawancara terhadap informan dan dokumentasi sesuai dengan keperluan penelitian. Tahap ini mengharuskan peneliti melakukan seleksi terhadap data yang diperoleh dari wawancara. Teknik *editing* dalam penelitian ini akan dilakukan dengan cara menyalin ulang jawaban hasil wawancara dan dokumentasi yang berhubungan dengan Strategi apa saja yang dilakukan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Lampung dalam memberdayakan dan mengelola TPI

Higenis. Data yang dianggap relevan dengan penelitian kemudian disusun dan dihubungkan dengan data-data lainnya, sehingga pada akhirnya diperoleh data yang saling berkaitan. Proses ini mengharuskan peneliti merangkai kata dalam bentuk bahasa yang baik, sesuai dengan kaidah serta mudah dimengerti. Kata-kata hasil dari proses wawancara yang tidak sesuai dengan kaidah yang ada selanjutnya diperbaiki, kemudian informasi diluar konteks penelitian selanjutnya dipilah untuk kemudian disingkirkan.

3.6.2 Interpretasi.

Interpretasi adalah memberikan penjabaran atau penjelasan mengenai berbagai data yang diperoleh sesuai dengan judul penelitian. Pelaksanaan interpretasi dilakukan dengan cara menguraikan jawaban dari narasumber dalam bentuk mendeskripsikan sesuai dengan pokok bahasan dalam penelitian. Pada proses ini, peneliti melakukan pencarian makna dari hasilwawancara yang sudah dilakukan dengan informan. Hasil wawancara yang telah memiliki makna akan dianalisis sesuai dengan fokus penelitian.

3.7 Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan proses menafsirkan informasi yang telah diperoleh. Menurut Bogdan dalam Sugiyono (2014:244) “Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan bahan-bahan lainnya, sehingga dapat mudah dipahami, dan tentunya dapat diinformasikan kepada orang lain. Proses analisis yang dilakukan merupakan suatu proses yang cukup panjang dan melibatkan beberapa komponen”. Menurut Hubberman dan Miles dalam (Fuad dan Nugroho,2014:63) terdapat tiga hal utama dalam analisis yakni, reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan/verifikasi yaitu:

3.7.1 Reduksi Data

Reduksi data identik dengan kegiatan pemilahan informasi hasil temuan dilapangan. Reduksi data diartikan sebagai proses pemilihan, pemusatan perhatian, pada penyederhanaan, pengabstrakan transformasi data kasar yang muncul dari catatan-catatan tulisan di lapangan (*field note*). Reduksi data di dalam penelitian ini dilakukan dengan cara memilah informasi penting hasil temuan di lapangan serta membuang yang tidak penting untuk selanjutnya dibuat kategori. Peneliti hanya memilih data berdasarkan kebutuhan sehingga data yang dianggap tidak mewakili informasi penelitian tidak peneliti cantumkan (Fuad & Nugroho, 2014:63-64).

3.7.2 Penyajian Data

Penyajian data merupakan pembagian pemahaman peneliti tentanghasil penelitian. Penyajian data mempermudah peneliti dalam melihat gambaran secara keseluruhan dari penelitian. Pada penelitian ini,penyajian data yang digunakan pada data yang telah direduksi yaitu disajikan dalam bentuk naratif yang didukung oleh dokumen-dokumen,tabel data, foto maupun gambar yang berkaitan dengan penelitian.

Dalam penelitian ini, penyajian data dilakukan dengan cara mendeskripsikan data yang telah direduksi secara jelas dan utuh ke dalam bentuk teks naratif tentang Strategi apa saja yang dilakukan dan berhasil atau tidak strategi tersebut agar dapat menarik kesimpulan. Jika proses penyajian data diyakini sudah mencapai dua tujuan tersebut, maka langkah analisis data yang terakhir, yakni penarikan serta pengujian kesimpulan dapat dilakukan.

3.7.3 Penarikan Kesimpulan

Pengambilan kesimpulan merupakan tahap akhir dalam rangkaian analisis data kualitatif. Peneliti menganalisis dan mencari pola, hubungan persamaan hal-hal yang sering timbul yang dituangkan dalam kesimpulan. Dalam penelitian ini, pengambilan kesimpulan dilakukan dengan cara melakukan pengambilan intisari,dari serangkaian kategori hasil penelitian berdasarkan wawancara, dan dokumentasi hasil penelitian. Pada tahap ini, peneliti menarik kesimpulan berdasarkan analisis dari data-data hasil dari wawancara, observasi dan studi dokumentasi yang telah diperoleh yaitu tentang Strategi yang telah dilakukan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Lampung dalam memberdayakan dan mengelola TPI Higenis Tahun 2020 untuk menjawab rumusan masalah yang sudah disusun.

3.8 Teknik Keabsahan Data

Teknik keabsahan data atau kredibilitas data merupakan penyesuaian data yang diperoleh peneliti dengan data yang terjadi pada objek penelitian. Cara uji kredibilitas yang digunakan adalah melalui proses triangulasi. Apabila peneliti melakukan pengumpulan data dengan triangulasi, maka sebenarnya peneliti mengumpulkan data yang sekaligus menguji kredibilitas data, yaitu mengecek kredibilitas data dengan berbagai teknik pengumpulan data dan sumber data (Sugiyono,2014:241). Penelitian ini menggunakan teknik triangulasi waktu. Triangulasi waktu adalah teknik menguji data dan informasi dengan cara wawancara, observasi atau teknik lain dengan waktu yang berbeda. Data dari informan telah dikompilasikan dengan hasil dokumentasi yang memiliki kesamaan informasi.

3.8.1 Trigulasi Data

Tresiana (2013:147) Triangulasi merupakan suatu teknik pemeriksaan data dengan memanfaatkan sesuatu yang lain diluar data itu untuk keperluan

pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data itu. Adapun tiga teknik triangulasi yaitu:

a. Triangulasi sumber

   Triangulasi sumber untuk menguji kredibilitas data dilakukan dengan cara mengecek data yang telah diperoleh melalui beberapa sumber.

b. Triangulasi Teknik

   Triangulasi teknik untuk menguji kredibilitas data di lakukan dengan cara mengecek data kepada sumber yang sama dengan teknik yang berbeda.

c. Triangulasi Waktu

   Pengujian kredibilitas data dapat dilakukan dengan cara pengecekan dengan wawancara, observasi atau teknik lain dengan waktu yang berbeda.

IV. GAMBARAN UMUM

4.1 Gambaran umum Desa Muara Gading Mas (MGM), Kecamatan Labuhan Maringgai, Kabupaten Lampung Timur

4.1.1 Sejarah terbentuknya Desa Muara Gading Mas

Desa Muara Gading Mas pada mulanya merupakan daerah hutan belantara dan daerah pantai yang masih alami dan belum terjamah oleh tangan manusia, baru pada tahun 1984 desa Muara Gading Mas dibuka, dengan kondisi yang masih sangat jauh dari ke moderenan. Pada tanggal 05 Februari 1985 Desa Muara Gading Mas baru resmi dibuka dan diberi nama "Muara Gading Mas", dimana Muara berarti sungai kecil yang mengalir di desa tersebut yang berbatas akhir dengan tepi laut yang menjadi muara sungai, sedangkan kata "Gading" berarti aliran sungai desa yang berhubungan dengan sungai yang ada di Way Kambas, dimana letak tinggalnya para gajah. Dengan kata "Mas" berarti logam mulia yang berarti desa tersebut sangat berharga dan dapat menjadi sarana untuk mengumpulkan materi yang berharga yang diperoleh dari desa tersebut.

Seiring dengan perkembangan zaman dan hasil laut yang memadai, akhirnya desa Muara Gading Mas dapat membenahi diri dan terus meningkatkan kemajuan. Hal ini berawal dari semakin banyaknya warga yang berdatangan ke desa tersebut untuk mengadu nasib dengan memanfaatkan hasil laut. Para warga yang berdatangan tersebut datang dari berbagai daerah namun mayoritas dari daerah Sulawesi Selatan dan Jawa Pantura dari Timur sampai Barat. Dengan kehadiran warga baru tersebut akhirnya mereka bekerja sama membangun desa dan meningkatkan mata pencaharian mereka.

Meskipun masih terhitung muda namun saat ini desa Muara Gading Mas sudah dapat dikatakan desa yang maju, terbukti dengan semakin padatnya maju, terbukti dengan semakin padatnya pemukiman penduduk dan sarana telekomunikasi pun saat ini sudah dapat dinikmati oleh masyarakat. Dan desa ini pun merupakan lintas timur perjalanan ke pelabuhan bakauheni yang pada akhirnya di desa ini akan dibangun sebuah pelabuhan yang menghubungkan Lampung dan Jakarta. Dalam perkembangan selanjutnya desa ini terus maju dan berkembang, hal ini tidak terlepas dari keberhasilan para aparat desa dan kepala desa yang kreatif, dimana sampai ini desa Muara Gading Mas sudah mengalami enam kali pergantian kepala desa yang dapat memimpin dan mendorong masyarakat dalam memajukan desa yang diringi dengan jiwa gotong royong.

4.1.2 Kondisi Geografis dan Demografis

Desa Muara Gading Mas adalah sebuah desa yang terletak di ujung timur kabupaten Lampung Timur, yang berbatasan akhir dengan Laut Jawa adapun ketinggian tanahnya dari permukaan laut adalah 3 meter dan mempunyai suhu udara rata-rata 25C, dan batas-batas Desa Muara Gading Mas dengan desa sekitarnya adalah sebagai berikut:

a) Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Sriminosari
b) Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Bandar Negeri
c) Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Labuhan Maringgai
d) Sebelah Timur berbatasan dengan Laut Jawa

Desa Muara Gading Mas merupakan jalur lintas timur menuju pelabuhan Bakauheni, dan jarak desa menuju Ibu kota kabupaten 50 km ke arah barat dan jarak menuju Ibu kota Provinsi adalah 50 km ke arah Selatan. Sedangkan jarak ke kecamatan adalah 2 km ke arah Barat. Adapun luas Desa Muara Gading Mas menurut catatan Dinas Pertanahan dan Agraria adalah 654,5 ha. Yang terdiri dari tanah persawahan 45 ha., tanah pemukiman 300 ha. dan tanah tambak 90 ha. Sedangkan penduduk yang berdomisili di Desa Muara

Gading Mas, terdiri atas berbagai macam suku bangsa dan bahasa yang di antaranya, suku Lampung sebagai penduduk asli, suku Bugis, Jawa, Minang dan Palembang. sampai saat ini jumlah penduduk Muara Gading Mas sebanyak 10.477 jiwa, yang terbagi dalam 2.810 kepala keluarga dan 5382 laki-laki serta 5095 perempuan.

4.1.3 Keadaan Sosial Ekonomi Desa Muara Gading Mas

Keadaan sosial adalah suatu keadaan yang menunjukkan perilaku bersosialisasi seperti rukun dan damai dalam suatu desa dalam bermasyarakat. Dari berbagai macam dan ragam agama serta kebudayaan desa Muara Gading Mas mayoritas masyarakatnya beragama Islam, dan setelah itu diikuti oleh agama Kristen. Toleransi dalam bermasyarakat sangat berpengaruh dalam kondisi sosial di Desa Muara Gading Mas, hal ini terlihat dari cara masyarakatnya berintergrasi dan bertoleransi dalam acara keagamaan hal ini semakin menumbuhkan jiwa kebersamaan dan semangat gotong-royong yang tinggi.

Sedangkan dari segi ekonomi, Desa Muara Gading Mas dapat diketahui bahwa perekonomian penduduk desa sangat bergantung pada hasil tangkapan laut baik dalam bentuk perdagangan maupun sektor perikanan. Secara garis besar penduduk desa ini terdiri dari nelayan dan pedagang. Jika dilihat dari tingkat perekonomian cuaca juga merupakan faktor penentu dalam mata pencaharian sebagai nelayan yaitu pada saat musim barat dan timur. Saat musim barat tiba maka penghasilan masyarakat yang sebagai nelayan akan meningkat, dalam hal ini juga tergantung dari alat penangkap ikan nelayan. Karena dalam faktor ini alat tangkap nelayan yang baik menentukan pendapatan mereka dalam menangkap ikan. Berikut ini tabel kondisi mata pencaharian masyarakat Desa Muara Gading Mas.

Tabel 11. Kondisi mata pencaharian masyarakat Desa Muara Gading Mas

No.	Mata Pencaharian Pokok	Jumlah	No.	Mata Pencaharian Pokok	Jumlah
1.	Buruh nelayan	1.869	8.	Peternak	17
2.	Buruh petani	763	9.	Dokter	2
3.	Nelayan	632	10.	TNI/POLRI	4
4.	Petani	365	11.	Bidan/perawat	9
5.	Pedagang	280	12.	Pengrajin	10
6.	Industri kecil	37	13.	Penjahit	9
7.	PNS	41	14.	Tukang kayu	5

(Sumber: *Kantor Kecamatan desa Muara Gading Mas 2021*)

4.1.4 Visi dan Misi Desa Muara Gading Mas

Sebagaimana desa-desa yang lain, Desa Muara Gading Mas, Kecamatan Labuhan Maringgai, Kabupaten Lampung Timur juga memiliki visi dan misi bagi desanya. Berikut merupakan visi dan misi Desa Muara Gading Mas, Kecamatan Labuhan Maringgai, Kabupaten Lampung Timur:

a. Visi Desa Muara Gading Mas, Kecamatan Labuhan Maringgai, Kabupaten Lampung Timur, yaitu: Terwujudnya Kehidupan dan kesejahteraan masyarakat Desa Muara Gading Mas yang taat agama, toleransi dalam keberagaman agama dan budaya, Harmonis, Adil dan Tertib.
b. Misi Desa Muara Gading Mas, Kecamatan Labuhan Maringgai, Kabupaten Lampung Timur:
    1) Meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa Muara Gading Mas
    2) Meningkatkan kesejahteraan ekonomi dalam masyarakat
    3) Kualitas pendidikan dan kesehatan yang merata dan terjangkau
    4) Meningkatkan ekonomi kerakyatan yang berbasis Agribisnis dan perikanan.

4.1.5 Struktur Organisasi Desa Muara Gading Mas

Berikut adalah sturktur organisasi Pemerintahan desa Muara Gading Mas, Kecamatan Labuhan Maringgai, Kabupaten Lampung Timur:

1. BPD;
2. Kepala Desa;
    a. Kepala dusun;
3. Sekertaris desa;
    a. Kaur pembangunan;
    b. Kaur umum;
    c. Kaur keuangan;
4. Pelaksanaan Teknis;
    a. Kasi administrasi;
    b. Kasi kesra;
    c. Kasi pemerintahan.

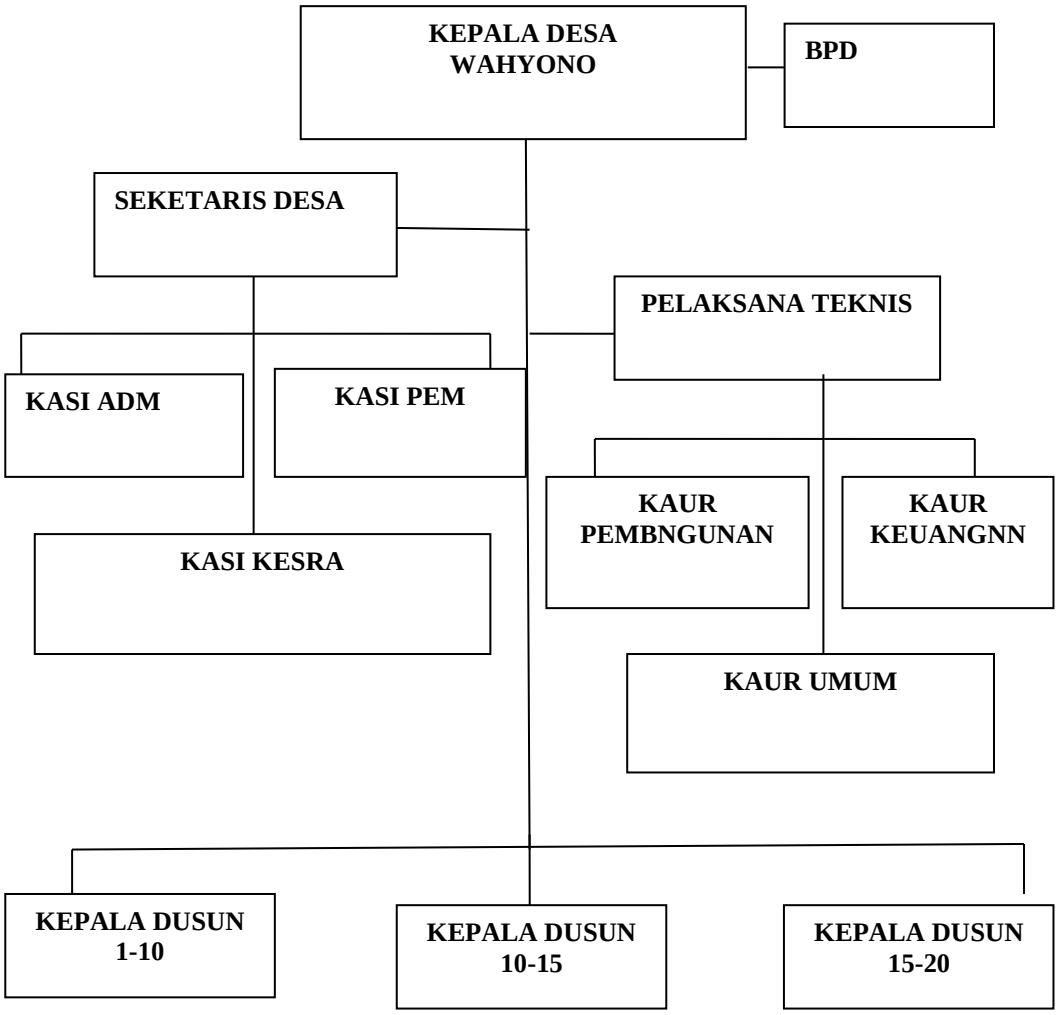

Gambar 2. Struktur Organisasi Desa Muara Gading Mas
(Sumber: *Kantor Kecamatan Desa Muara Gading Mas 2021*)

4.2 Sejarah berdirinya TPI Desa Muara Gading Mas

4.2.1 Sejarah Berdirinya TPI Higenis

(Sumber: *Kantor Kecamatan desa Muara Gading Mas 2021*)

Tempat Pelelangan Ikan desa Muara Gading Mas dibangun pada tanggal 6 januari 2000 dan diresmikan pada tanggal 10 Mei 2002 dengan nama Tempat Pelelangan Ikan Higenis. Nama ini diberikan langsung oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan, dengan tujuan agar terciptanya TPI dengan sistem lelang dan fasilitas yang secara higenis dibandingkan dengan Tempat Pelelangan Ikan sebelumnya. TPI Higenis merupakan satu-satunya TPI yang masih beroprasi dan berjalan, TPI ini menjadi andalan kebanggan untuk Pemerintah Kabupaten Lampung Timur. TPI Higenis terletak di Desa Muara Gading Mas Kecamatan Labuhan Maringgai serta dekat dengan akses transportasi untuk pemasaran dan distribusi hasil perikanan, selain itu juga dekat dengan TPI perikanan yang terletak di desa Margasari. TPI Higenis berada di bawah tanggungjawab UPT (Unit Pelaksanaan Teknis) Dinas Perikanan Kabupaten Lampung Timur, meskipun demikian Dinas Kelautan Dan Perikanan Provinsi Lampung tetap memegang peran penting dalam mengawasi dan mengelola Tempat Pelelangan Ikan ini. Adapun tugas dan

fungsi yang dimiliki oleh TPI Higenis desa Muara Gading Mas yaitu pengamanan TPI, melelangkan ikan serta penimbangan, pengaturan bongkar muat ikan, kelancaran pungutan serta penyetoran hasil pungutan lelang, penyelenggaraan administrasi lelang, pengaturan penggunaan tempat pelelangan ikan, pengawasan, bimbingan dan pengendalian kegiatan di TPI.

Pada tahun 2011 Pelaksanaan pelelangan ikan di TPI Kuala Muara Gading Mas dilaksanakan setiap hari mulai pukul 7.30 WIB hingga selesai, namun sejak November 2011 terhitung kurang lebih 10 tahun ini TPI Muara Gading Mas sudah tidak menggunakan sistem lelang murni. Hal ini terjadi karena di depan TPI Higenis mengalami pendangkalan kolam pelabuhan sehingga tidak ada tempat bersandar atau mendaratkan para kapal nelayan, hal ini menyebabkan para pemilik kapal membongkar hasil tangkapan tidak di TPI. Selain itu, permintaan dari masyarakat nelayan yang merasa sistem lelang di TPI hanya menguntungkan salah satu pihak saja yaitu pemilik modal. Sedangkan untuk masyarakat menengah kebawah atau tengkulak selalu kalah saat proses pelelangan karena tidak mempunyai modal. Meskipun sistem lelang di TPI Muara Gading Mas sudah tidak lagi dipakai dalam menstabilisasi harga jual dan beli dipasar namun Tempat Pelelangan Ikan ini tetap beroparesional dan tetap dijadikan tempat transaksi jual dan beli ikan, namun bedanya sistem jual beli ini secara langsung kepada pembeli tanpa melalui sistem lelang murni.

4.2.2 Tujuan dan Fungsi Pendirian TPI Muara Gading Mas

a) Tujuan Pendirian TPI Muara Gading Mas
   1. Memperlancar dalam pelaksanaan pemasaran ikan melalui pelelangan ikan secara murni;
   2. Mengusahakan dan membuat stabilitas harga ikan agar terciptanya kesejahteraan masyarakat nelayan; dan
   3. Membuat taraf hidup masyarakat nelayan menjadi sejahtera.

b) Fungsi Pendirian TPI Muara Gading Mas Berdasarkan pasal 41A ayat (2) Undang-Undang nomor 45 Tahun 2009, tentang perubahan atas Undang-

Undang nomor 31 Tahun 2004, tentang perikanan. Adapun fungsi Pelabuhan Perikanan TPI Muara Gading Mas yaitu:

1. Pelayanan tambat dan labuan kapal perikanan
2. Pelayanan bongkar muat
3. Pelayanan pembinaan mutu dan pengolahan hasil perikanan
4. Pemasaran dan distribusi ikan
5. Pengumpulan data tangkapan dan hasil perikanan
6. Tempat pelaksanaan penyuluhan dan pengembangan masyarakat nelayan
7. Pelaksanaan kegiatan oprasional kapal perikanan
8. Tempat pelaksanaan pengawasan dan pengendalian sumber daya ikan
9. Pelaksanaan kesyahbandaraan
10. Tempat pelaksanaan fungsi karantina ikan
11. Publikasi hasil pelayanan sandar dan labuh kapal perikanan dan kapal pengawas kapal perikanan
12. Tempat publikasi hasil riset kelautan dan perikanan
13. Pemantauan wilayah pesisir dan wisata bahari, dan
14. Pengendali lingkungan

4.2.3 Visi dan Misi TPI Muara Gading Mas

a. Visi

Visi dari TPI Muara Gading Mas yaitu memberikan suatu pelayanan yang ekstra terhadap para pelaku usaha perikanan dengan rangka melaksanakan kemandirian dan pembangunan perekonomian perikanan rakyat serta pembangunan perekonomian daerah.

b. Misi

1. Mendorong para nelayan untuk melelangkan ikan pada hasil tangkapannya di TPI Muara Gading Mas, serta mendorong para pedagang untuk turut aktif pada proses pelelangan ikan.

2. Memaksimalkan pendapatan asli daerah (PAD) yang didapat dari penggunaan jasa serta prasarana dari TPI yang ada oleh para usaha perikanan.
3. Memperlancar proses dan mekanisme dalam pelelangan ikan.
4. Membimbing para pengelola serta karyawan TPI supaya mempunyai profesionalisme yang baik, dedikasi serta handal, sehingga dapat memberikan pelayanan yang ekstra.
5. Menciptakan rasa aman serta nyaman terhadap para produksi/nelayan serta pelaku usaha/Bakul Ikan dan Pengusaha pengolahan sebelum, selama serta setelah proses dari pelelangan.
6. Lelang Tunai serta mewujudkan kelancaran terhadap pembayaran dari transaksi pelelangan ikan agar terciptanya kestabilan harga.
7. Tidak terdapat KPLI (Kekurangan Pembayaran Lelang Ikan) terhadap Bakul serta Nelayan selama proses pelelangan.
8. Menyediakan sarana dan prasarana yang dibutuhkan dan memadai dalam proses selama pelelangan ikan berlangsung.
9. Membantu dalam Memfasilitasi proses pada penanganan hasil perikanan (Pasca panen serta pasca lelang) supaya terjamin kualitas yang tinggi dalam hasil perikanan tangkap.

4.2.4 Struktur Organisasi TPI Muara Gading Mas

Sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur No.04 tahun 2002 tentang Retribusi Tempat Pelelangan Ikan yang memuat struktur organsasi dalam bab IV pasal 11 tentangStruktur Organisasi Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan. Struktur Organisasi TPI Higenis desa Muara Gading Mas dimaksudkan untuk kelancaran jalannya suatu tempat pelelangan di perlukan beberapa bagian yang mempunyai tugas, wewenang dan tanggung jawab yang berbeda namun saling menunjang. Karena itu di perlukan struktur organisasi yang berfungsi untuk memperjelas tugas, wewenang dan tanggung jawab yang berbeda-beda pada tiap bagian untuk menjalankan dengan baik organisasi tempat pelelangan. Perlu di perhatikan pedoman, asas-asas atau

prinsip-prinsip organisasi, seperti perumusan tujuan yang jelas, pembagian kerja, pendelegasian kekuasaan, kesatuan perintah dan tanggung jawab serta tingkat pengawasan dan koordinasi. Tujuan di bentuknya struktur organisasi adalah untuk :

a. Pelaksanaan tugas atau pekerjaan yang ada.
b. Mempermudah pimpinan dalam mengawasi pekerjaan staff.
c. Mengkoordinasi kegiatan untuk mencapai tujuan yang di harapkan.
d. Menentukan kedudukan seseorang dalam fungsi kegiatan sehingga mampu menjalankan tugas yang di bebankan kepadanya dengan baik.

Pelelangan yang diselenggarakan oleh organisasi/kelompok nelayan petani ikan, pimpinan umurnnya dipegang oleh pengurus organisasi kelompok nelayan petani ikan. Demikian pula dengan TPI Higenis desa Muara Gading Mas yang juga menjalankan organisasinya dengan baik. Adapun struktur Organisasi TPI Higenis sebagai berikut:

1. Pimpinan umum berhak untuk menentukan nama-nama petugas pelelangan kecuali manajer pelelangan.
2. Petugas pelelangan ditentukan menurut keperluan kebutuhan di lapangan yang terdiri dari :
    a. UPTD
    b. manajer,
    c. kasir,
    d. juru tulis, ..
    e. juru lelang,
    f. juru tunjuk,
    g. juru timbang,
    h. petugas kebersihan,
    i. petugas keamanan.

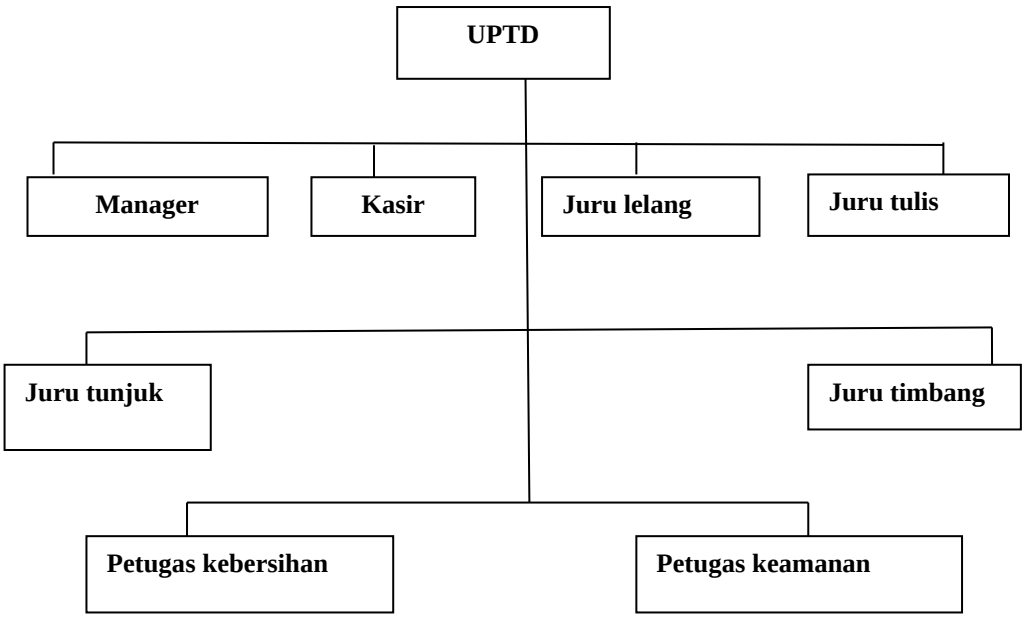

Gambar 3. Struktur Organisasi Tempat Pelelangan Ikan Higenis Desa Muara Gading Mas
(Sumber: *UPTD Tempat Pelelangan Ikan Desa Muara Gading Mas 2021*)

4.3 Gambaran umum Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Lampung

4.3.1 Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Lampung

Sesuai dengan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 80 tahun 2016 tentang tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Rincian Tugas, Fungsi Dan Tata Kerja Dinas Kelautan Dan Perikanan Provinsi Lampung dan telah diubah terakhir kali dengan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Lampung. Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Dinas Kelautan dan Perikanan memiliki tugas pokok, yaitu : Menyelenggarakan sebagian urusan pemerintah di bidang kelautan dan perikanan berdasarkan asas otonomi yang menjadi kewenangan, tugas dekonsentrasi dan pembantuan serta tugas lain sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Gubernur berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam penyelenggaraan tugas pokok tersebut di atas, Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Lampung mempunyai fungsi :

a) Perumusan kebijakan, pengaturan dan penetapan standar/pedoman skala provinsi;
b) Penyediaan dukungan, pengembangan perekayasaan teknologi perikanan serta sumberdaya perikanan lainnya;
c) Pengendalian terhadap pelaksanaan pemberantasan dan deradikasi penyakit ikan didarat;
d) Penataan dan pengelolaan perairan di wilayah laut provinsi;
e) Pelaksanaan eksplorasi, eksploitasi, konservasi dan pengelolaan kekayaan laut sebatas wilayah laut urusan provinsi;
f) Pelaksanaan konservasi dan pengelolaan plasma nutfah sefesifik lokasi serta swaka perikanan di wilayah laut urusan provinsi;
g) Pelayanan usaha pembudidayaan dan penangkapan ikan pada perairan laut diwilayah laut urusan provinsi; BAB 2 Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Lampung 2019– 2024 Edisi I Tahun 2019 7
h) Pengawasan, pemanfaatan sumberdaya ikan di wilayah laut urusan provinsi;
i) Pembinaan, pengendalian, pengawasan dan koordinasi;
j) Pelayanan administratif; dan
k) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan tugas dan fungsinya.

4.3.2 Strategi Dinas Perikanan Provinsi Lampung

Terdapat beberapa strategi yang menjadi arah kebijakan dalam penyusunan dan pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Kelautan dan Perikanan kurun waktu 2019-2020 yang dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Menerapkan prinsip-prinsip pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan yang bertanggung jawab dan berkelanjutan Arah Kebijakan :
   a. Pengelolaan laut dan pesisir berkelanjutan
   b. Pelaksanaan pengawasan terpadu dan terintegrasi

2. Meningkatkan produktifitas dan daya saing usaha perikanan Arah Kebijakan
   a. Pengembangan sistem budidaya perikanan berkelanjutan
   b. Pengelolaan perikanan tangkap berkelanjutan dan berkeadilan
3. Meningkatkan kesejahteraan nelayan dan pembudidaya Arah Kebijakan
   a) Peningkatan nilai tambah, mutu, keamanan pangan dan pemasaran produk perikanan
   b) Penguatan kapasitas kelembagaan, SDM, sarana dan prasarana, data teknologi dan informasi kelautan dan perikanan.

4.3.3 Visi dan Misi Dinas Perikanan Provinsi Lampung

a. Visi :

   Lembaga Sertifikasi Produk (LS-Pro) UPTD PMHP yang kompeten dan Berdaya saing. LS Pro HP PMHP Lampung adalah Lembaga Sertifikasi Produk Hasil Perikanan Pengembangan Mutu Hasil Perikanan mengacu pada SNI ISO/IEC 17065:2012 terbentuk pada tahun 2017 dengan nomor akreditasi : lspro-064-idn dari kan bsn didukung oleh personil yang profesional di bidangnya untuk melakukan sertifikasi, dalam mendukung program peningkatan daya saing, peningkatan ekspor, pengendalian impor dan pengawasan mutu produk yang beredar di pasar dalam negeri terhadap sistem mutu, inspeksi dan hasil uji mutu produk yang memenuhi persyaratan yang berlaku atau skema sertifikasi produk.

b. Misi :
   1. Meningkatkan SDM LSPro-HP UPTD LPPHP Lampung yang handal dan Kompeten
   2. Meningkatkan Jaminan Mutu Produk Hasil Perikanan Lampung melalui pemberian Sertifikat Produk Penggunaan Tanda SNI (SPPT-SNI)
   3. Meningkatkan kualitas dan kuantitas UPI yang mempunyai SPPT-SNI

4.3.4 Struktur Organisasi Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Lampung

Susunan Organisasi sebagaimana Pergub Nomor 56 tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Provinsi Lampung, dan Pergub Nomor 31 tahun 2019 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) pada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Lampung sebagai berikut :

1. Kepala Dinas;
2. Sekretariat, membawahi :
   a) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
   b) Sub Bagian Keuangan dan Aset; dan
   c) Sub Bagian Perencanaan.
3. Bidang Pengelolaan Ruang Laut, membawahi:
   a) Seksi Tata Ruang,
   b) Seksi Jasa Kelautan dan Pendayagunaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil; dan
   c) Seksi Konservasi Keanekaragaman Hayati Laut
4. Bidang Perikanan Tangkap, membawahi :
   a) Seksi Pengelolaan Sumberdaya Ikan;
   b) Seksi Penangkapan Ikan dan Kenelayanan; dan
   c) Seksi Pengelolaan Pelabuhan Perikanan.
5. Bidang Perikanan Budidaya dan Penguatan Daya Saing, membawahi :
   a) Seksi Produksi dan Pengembangan Usaha Perikanan Budidaya;
   b) Seksi Pengendalian Kesehatan, Pakan dan Obat Ikan; dan
   c) Seksi Penguatan Daya Saing.
6. Bidang Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan, membawahi :
   a) Seksi Pengawasan Pengelolaan Sumberdaya Kelautan,
   b) Seksi Pengawasan Pengelolaan Sumberdaya Perikanan; dan
   c) Seksi Penanganan Pelanggaran dan Penegakan Hukum
7. Unit PelaksanaTeknis Daerah (UPTD)terdiri dari :
   a) UPTD Penerapan Mutu Hasil Perikanan Kelas A;

b) UPTD Perbenihan Ikan Kelas A;
c) UPTD Pelabuhan Perikanan Lempasing Kelas A;
d) UPTD Pelabuhan Perikanan Labuhan Maringgai dan Teladas Kelas A;
e) UPTD Pelabuhan Perikan Kota Agung Kelas A;

8. Kelompok Jabatan Fungsional, terdiri dari sejumlah jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilannya

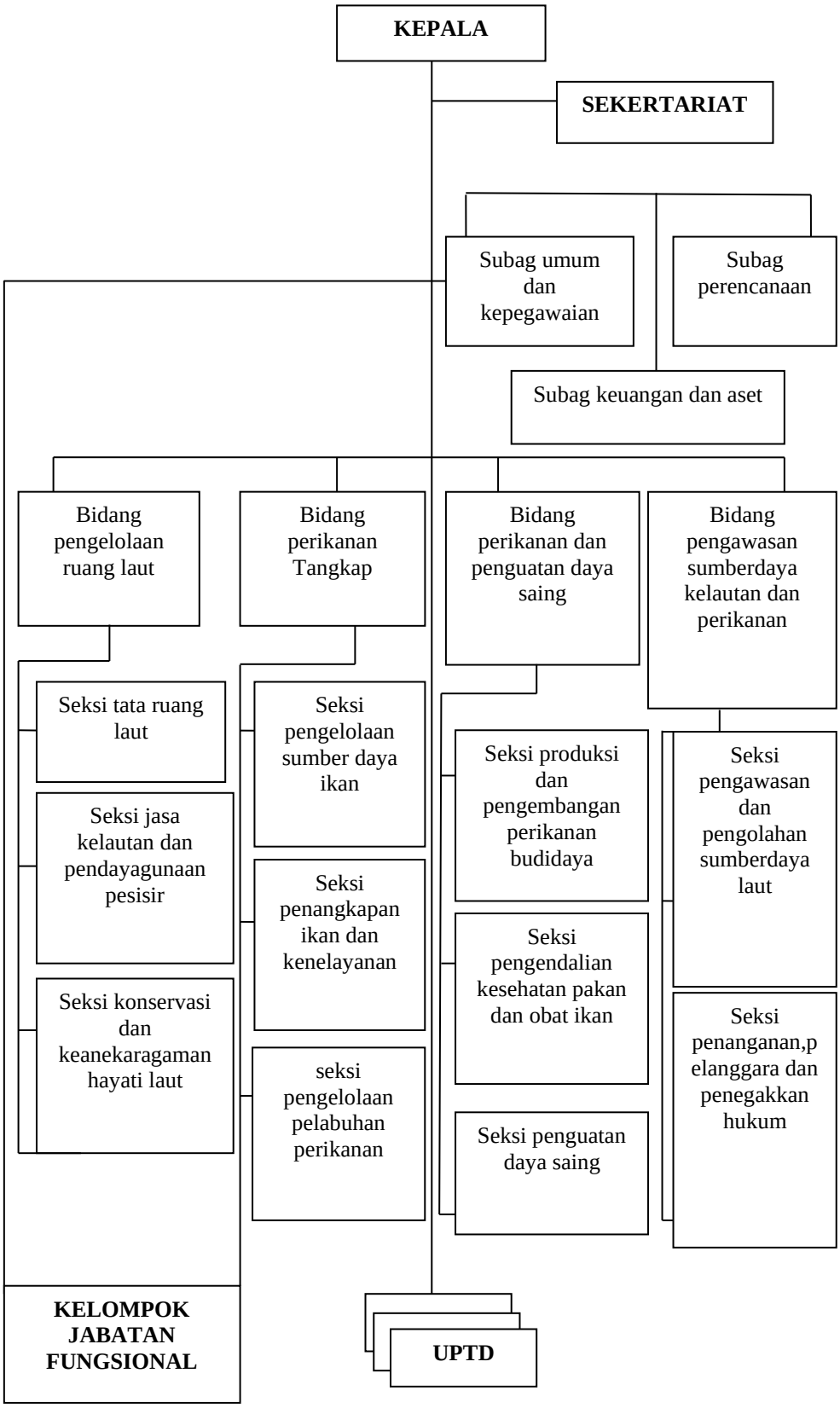

Gambar 4. Struktur Organisasi Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Lampung

(*Sumber: Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Lampung 2021)*

VI. SIMPULAN DAN SARAN

6.1 Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka dapat ditarik kesimpulan bahwa strategi Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Lampung, dalam melakukan pemberdayaan dan pengelolaan Tempat Pelelangan Ikan di Desa Muara Gading Mas sudah berjalan dengan baik namun belum optimal. Dilihat dari strategi eksternal bahwa tidak ada kerja sama yang dilakukan dengan KUD Bina Mina hal ini karena KUD Bina Mina sudah tidak beroperasi lagi dikarenakan pelaksanaan yang tidak sesuai dengan pirnsip-prtinsip koperasi dan kurangnya partisipasi dari anggota KUD, sedangkan strategi internal dapat dilihat dari program-program yang dibuat dan dijalankan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Lampung. sejalan dengan konsep prinsip-prinsip pemberdayaan yang dipaparkan oleh Maryani dan Nainggolan (2009:11) yang terdiri dari prinsip kesetaraan, prinsip partisipasi, prinsip kemandirian dan prinsip berkelanjutan yang diterapkan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Lampung sudah berjalan dengan baik namun belum optimal, hal ini dapat terlihat dari uraian simpulan dari peneliti:

1. Prinsip Kesetaraan (Sosialisasi) strategi yang dilakukan sudah berjalan dengan baik namun karena stakeholder dan waktu pelaksanaan yang tidak sesuai dengan jadwal semestinya karena kendala teknis dan pengurangan dana anggaran selama masa pandemi membuat masyarakat menyepelekan program yang diberikan dan akibatnya masih banyak masyarakat disekitar TPI yang membuang sampah dan limbah ke selokan, kubangan, bahkan laut.
2. Prinsip Partisipasi (Pembinaan) strategi yang diberikan kepada masyarakat nelayan sudah berjalan dengan baik dan memberikan

perubahan dalam penanganan hasil tangkapan perikanan agar tetap higenis dengan cara memberikan wadah dan alas pada hasil tangkapan agar tetap terjamin kualitasnya terjaga dengan higenis tetapi dari kelima program pembinaan hanya tiga program perikanan tangkap yang masih berjalan yaitu: Pelatihan tentang pengolahan dan menjaga kualitas hasil tangkapan, Pembinaan teknis pengawasan mutu hasil perikanan, Tata cara penanganan ikan yang baik atau hasil tangkapan lainnya. Sedangkan untuk dua program yang belum berjalan ini yaitu: penyuluhan penggunaan alat tangkap ramah lingkungan dan pemberdayaan perempuan pesisir diketahui karena faktor SDM dan pengalihan dana anggaran karena dua program ini memerlukan dana yang dan SDM yang tidak sedkit di setiap pembinaan yang dilakukan.

3. Prinsip Kemandirian (Pelatihan) pemberian pelatihan tentang cara penanganan rajungan di miniplant dengan tujuan agar masyarakat nelayan, Pembina, dan karyawan produksi lebih mandiri dan memanfaatkan peluang yang ada.
4. Prinsip Berkelanjutan (Program Berkelanjutan) program yang berkelanjutan merupakan program perencanaan yang belum direalisasikan. Berdasarkan permasalahan yang terjadi di TPI Higenis yaitu sistem lelang yang mati dan kebersihan lingkungan ada dua program berkelanjutan dalam pemberdayaan dan pengelolaan TPI Higenis yaitu pengadaan TPA dan Pengerukkan kolam pelabuhan.

Secara aspek keseluruhan, upaya yang dilakukan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Lampung dalam melakukan pemberdayaan masyarakat nelayan dan pengelolaan Tempat Pelelangan Ikan dengan memanfaatkan dan mengelola SDM yang ada merupakan bentuk strategi yang menjadi penentu dan tolak ukur keberhasilan dari strategi yang dilakukan, upaya dan strategi yang dilakukan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Lampung memberikan dampak positif dan perubahan bagi masyrakat nelayan. Strategi ini membantu masyarakat nelayan dalam mengelola dan menjaga TPI Higenis, memberikan pengetahuan tentang cara penanganan dan pengolahan hasil perikanan dengan benar, aturan-aturan penangkapan

ikan yang di perbolehkan dan yang dilarang, dan cara pengolahan ikan teri serta perbaikan mesin kapal, selain itu pengadaan TPA, penyediaan tong sampah di area TPI higenis dan pengerukan kolam pelabuhan agar sistem lelang murni dapat hidup kembali dengan tujuan mensejahterakan masyarakat setempat dan meningkatkan PAD. Strategi yang dilakukan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Lampung dengan memberikan sosialisasi, pembinaan dan pelatihan adalah bentuk dari upaya pemberdayaan dan pemeliharaan masyarkat dan TPI Higenis di Desa Muara Gading Mas.

6.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka Penulis memberikan saran terkait Strategi Pemberdayaan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Lampung dalam Pengelolaan Tempat Pelelangan Ikan Tahun 2020 adalah sebagai berikut:

1. Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Lampung yang bertindak sebagai penyedia sarana dan prasarana atau fasilitator dalam program pemberdayaan dan pengelolaan TPI Higenis harus konsisten dan melakukan perubahan teknis dalam pemberian sosialisasi,pembinaan,dan juga pelatihan, dalam melaksanakan sosialisasi, pembinaan dan pelatihan harus sesuai dengan waktu pelaksaan atau stakeholder yang telah dibuat, menjalankan program secara keseluruhan dan tidak hanya beberapa program pembinaan agar ilmu pengetahuan yang diperoleh dapat diterapkan dengan optimal seperti sosialisasi kebersihan lingkungan, pembinaan teknis pengawasan mutu hasil perikanan, dan pelatihan penanganan rajungan di miniplant.
2. Memperbanyak program pelatihan yang bisa meningkatkan life skill dan keterampilan bagi masyarakat nelayan.
3. Menghidupkan kembali sistem lelang murni sebagai fungsi utama dari Tempat Pelelangan Ikan agar dapat menjadi stabilitas dari harga hasil

tangkapan perikanan, meningkatkan sumber Pendapatan Asli Daerah melalui penarikan retribusi dan menjalin kerjasama dengan pihak lain seperti KUD agar mempermudah masyarakat nelayan dalam pinjaman sebelum berlayar.

4. Meningkatkan pelayanan dasar dari UPTD PPP Labuhan Maringgai dengan prioritas yang utama yaitu penyediaan fasilitas kebersihan dan petugas yang mendukung.
5. Peningkatan kapasitas tambat labu dengan memperdalam kolam pelabuhan dengan tujuan meningkatkan kapasitas kapal yang berlabu dengan mecari sumber pendanaan yang lain selain APBD karena dalam pengerukan kolam pelabuhan memerlukan pendanaan yang besar.
6. Peningkatan higenitas dan sanitasi di area sekitar TPI serta pembangunan dan penyediaan TPA.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Anggito, Albi & Johan Setiawan. 2018. *Metode Penelitian Kualitatif*. awa Barat: Cv. Jejak

Fachrudin,Andi. 2016. *Manajemen Pertelevisian Modern*. Yogyakarta: Cv. Andi Offset

Fauzi, Akhmad. 2005. *Kebijakan Perikanan Dan Kelautan*. Jakarta : Pt Gramedia Pustaka Utama.

Hajar,Dkk. 2018. *Pemberdayaan Dan Partisipasi Masyarakat Pesisir*. Medan: Aqli

Herujito, Yayat M. 2001. *Dasar-Dasar Manajemen*. Jakarta: Grasindo Kanto, Muklis & Patta Rappana. 2017. *Filsafat Manajemen*. Celebes Media Perkasa

Kusnadi. 2013. *Strateg Hidup Masyaraka Nelayan*. Yogyakarta : Pt Lkis Printing Cemerlang

Maryani, Dedeh & Ruth Rosellin Nainggolan. 2019. *Pembedayaan Masyarakat*. Yogyakarta: Cv. Budi Utama.

Rahayu, Puji T. 2019. *Enslikopedia Profesi Nelayan*. Jawa Tengah: Al Pirin

Rangkuti, Freddy. 2006. *Analisis Swot Teknik Membedah Kasus Bisnis*. Jakarta: Pt Ikat Mandiri Abadi

Rukin. 2019. *Metode Penelitian Kualitatif*. Sulawesi Selatan: Yayasan Ahmar Cendikia Indonesia

Sudirman Anwar, Dkk. 2019. *Manajamen Perpustakaan*. Riau: Pt Indragiri.

Sugiyono. 2016. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D.* Alfabeta, Bandung.

Sukmadi. 2017. *Dasar-Dasar Manajemen: Kepemimpinan Lintas Agama*. Bandung: Humaniora

Widodo, J & Suadi. 2006. *Pengelolaan Sumberdaya Perikanan Laut*, Gadjah Mada University Press.

Wrihatnolo, Randy.R, & Riant Nugroho, 2007. *Manajemen Pemberdayaan Sebuah Pengantar Dan Panduan Untuk Pemberdayaan Masyarakat*. Jakarta: Pt Elex Media Komputindo Kelompok Gramedia.

Yunus, Eddy.2016. *Manajemen Strategis.* Cv Andi Offset, Yogyakarta.

Jurnal

Aji,dkk. 2016. *Fungsi dan pengelolaan tempat pelelangan ikan di kabupaten pati berdasarkan perda no. 19 tahun 2009 tentang pengelolaan ikan.* Jurnal undip. Volume 5. Nomor 1.

Amri, Khairul dkk. 2020. *Manajemen pemberdayaan masyarakat desa di Kabupaten Bangkalis*. Jurnal Niara. Volume 13. Nomor 01 Hal. 229-230.

Hertanto ,Sandi dkk. 2013. *Peran pemerintah daerah dalam mengelola Tempat pelelangan ikan di kabupaten jepara*. Jurnal ilmu pemerintahan. Volume 5. Nomor 2.

Rostiyati, Ani, 2018. *Peran ganda perempuan nelayan di desa muara gading mas lampung timur.* Jurnal patanjala. Volume 10. Nomor 2. Hal. 188

Setiarso, dkk. 2010. *Analisis efisiensi teknis tempat pelelangan ikan dan startegi pemberdayaan pengelolaan tempat pelelangan ikan kabupaten cilacap.* Jurnal Eko-regonal. Volume 5. Nomor 1. Hal. 17

Siska,dkk. 2018. *Strategi pemberdayaan masyarakat nelayan soma pajeko di kecamatan salibabu kabupaten kepulauan talaud Sulawesi utara.* Jurnal sosek KP. Volume 13. Nomor 1. Hal. 88

Suyanto, Bagong. 2011 . *Mekanisme Survival, Identifikasi Kebutuhan dan Pemberdayaan Nelayan Miskin Dalam Masa Kritis Akibat Kenaikan Harga BBM.* Jurnal Departemen Sosiologi FISIP, Universitas Airlangga : Surabaya. Volume 24. Nomor 1. Hal. 75

Tallesang , Mukhtar. 2011. *Strategi pemberdayaan nelayan Kabupaten Donggala: Pendekatan kolektif*. Jurnal persepsi. Volume 15. Nomor 1.

Skripsi, Tesis Dan Disertasi

Firdaus, Nusaiban Zahratul . 2020. *Pemberdayaan Masyarakat Pesisir melalui Program Kelompok Usaha Bersama (KUBE) Gumah (studi kasus Kelurahan Panggung Kec. Tegal Timur kota Tegal).* (Skripsi). IAIN Purwokerto

Wahid, Wita Dwi Astuti. 2016. *Dampak Keberadaan TPI terhadap Pembangunan Infrastruktur dan Kondisi sosial Ekonomi masyarakat di Kelurahan Bentengnge Kacematan Ujung Belu, Kab. Bulukkumba.* (Skripsi). UIN Alahuddin. Makassar.

Widaywati, Tri. 2018. *Analisis pengelolaan Tempat pelelangan ikan serta strategi pemberdayaannya di wilayah pantai utara, jawa tengah.* (Tesis). Universitas diponegoro. Semarang

Wijaya, Sulastri. 2015. *Strategi tempat pelelangan ikan Logending kabupaten Kebumen untuk meningkatkan kesejagteraan nelayan dalam perspektif ekonomi islam*. (Skripsi). IAIN Purwokerto. Purwokerto

Winarno, Djoko Wahyu. 2011. *Kebijakan Pemerintah Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Nelayan (Studi Kebijakan Pemerintah pada Nelayan Pantai Timur Pulau Jawa).* (Disertasi). Universitas Gadjah Mada. Yogyakarta.

Undang-Undang

Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur No. 04 Tahun 2002, tentang Pengelolaan dan Retribusi TPI Kabupaten Lampung Timur.

Undang-undang No. 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian

Undang-Undang No. 22 tahun 1999, tentang otonomi daerah.

Undang-Undang No. 25 tahun 2009, tentang pelayanan publik.

Undang-Undang No. 31 tahun 2004,tentang pengelolaan perikanan

Undang-Undang No. 45 tahun 2009, tentang perikanan.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Perda Nomor 03 Tahun 2011 Paragraf 4 Pasal 57 Nomor (1) tentang Retribusi Daerah

Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan

Media Online

https://kkp.go.id/brsdm/puslatluh/artikel/18220-sukseskan-program-pemerintah-brsdm-djpt-sosialisasikan-juknis-bantuan-premi-ansuransi-nelayan-2020#:~:text=Jumlah%20nelayan%20yang%20terdata%20pada,2020%20berjumlah%201.459.8745%20orang. (diakses 9 November 2020 pukul 09.05 WIB)

https://kkp.go.id/setjen/page/2455-tugas-dan-fungsi-pusat-data-statistik-dan-informasi (diakses 12 November 2020 pukul 15.10 WIB)

Pusat Informasi Pelabuhan dan Perikanan Labuhan Maringgai. 2020. *Jumlah dan produksi harga ikan dari kapal.*

Pusat Pelatihan dan Penyuluhan Kelautan dan Perikanan. 2020. *Jumlah nelayan di Indonesia dari tahun 2017-2020.*

Sumber Pusat Data Statistik dan Informasi Kementerian Kelautan dan Perikanan. 2020. *Laju pertumbuhan PDB.*

http://pipp.djpt.kkp.go.id/profil_pelabuhan/3922/informasi (diakses 12 November 2020 pukul 12.15 WIB)